

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI DI KAMPUNG ZAKAT TERPADU DUSUN PACEH
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Moh. Rowibuddin
NIM. E20152141

Dosen Pembimbing:

Ahmadiono, M.EI
NIP. 197604012003121005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI DI KAMPUNG ZAKAT TERPADU DUSUN PACEH
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE JEMBER)**

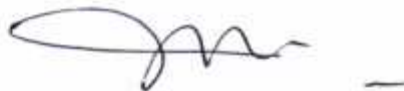
SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Moh. Rowibuddin
NIM. E20152141

Disetujui Pembimbing



Ahmadiono, M.EI
NIP. 197604012003121005

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI DI KAMPUNG ZAKAT TERPADU DUSUN PACEH
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE JEMBER)**

SKRIPSI

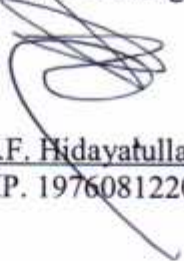
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



M.F. Hidayatullah, M.Si
NIP. 197608122008011015

Sekretaris



Nurlika Mauliyah, SE., M.AK
NIP. 198803012018012001

Anggota

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I



Menyetujui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



11/2-20

Hamdan Rifa'i, SE, M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia (QS.Ar Ra'ad: 11).*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), 337.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Istitut Agama Islam Negeri Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Hasan Basri dan Ibu Su'ina, yang selalu mendo'akan saya dan mendukung saya dalam setiap perjuangan menggapai cita-cita serta tak lepas memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun material untuk keberhasilan saya.
2. Saudara kandung M. Hanafi yang selanlu memberikan semangat dan menjadi pengobat lelah bagi saya.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam melancarkan cita-cita saya dimanapun saya berada.
4. Guru-guru ku, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu serta do'a yang diberikan.
5. Keluarga besar JONG MADURA IAIN Jember.
6. Keluarga besar IAA Kabupaten Jember
7. Keluarga besar PMII Rayon FEBI IAIN Jember, Khususnya angkatan GELOMBANG yang senasib dan seperjuangan.
8. Keluarga besar Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum IAIN Jember.
9. Keluarga besar BAIGON
10. Keluarga besar kelas ES 4
11. Demisionir HMPS-ES Periode 2015
12. Dan segenap civitas akademik IAIN Jember

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan limpahan nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” ini dapat terselesaikan. Sholawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya dari jurang kajahilan menuju menuju alam yang penuh terang-menderang ini dengan adanya agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlihat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut di ucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i SE, M.Si selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E. I selaku Ketua Program Studi ekonomi Syariah yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan dan penyelesaian program S1

4. Ahmadiono, M.E. I selaku Dosen Pembimbingrta Skripsi yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia melangkan waktunya demi kelancara penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Muslim, S.Ag., M.Sy. selaku Direkturkampung Zakat Terpadu.
7. Seluruh anggota yang bersedia memberikan informasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepadapenulis dalam daam bentuk do'a atau apapun dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak merupakan halyang berharga bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dana bagi masyarakat pengguna pada umumnya, *Amin, Amin ya robbal alamin.*

Jember, 26 November 2019
Peneliti

Moh. Rowibuddin
NIM. E20152141

ABSTRAK

Moh. Rowibuddin, Ahmadiono, M.EI. 2019: Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Masalah kemiskinan sampai saat ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yaitu Program Pengembangan Ekonomi. Program Pengembangan Ekonomi merupakan suatu program yang memberikan bantuan berupa bantuan hewan ternak, bantuan paket sembako, dan bedah rumah kepada keluarga miskin jika mereka memenuhi persyaratan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek di Kampung Zakat terpadu Dusun paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis yang digunakan menggunakan analisis drskriptif. Dan keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* sosialisasi Program Pengembangan Ekonomi di kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah dilaksanakan dengan baik, yang menjadi pelaksana kebijakan adalah Kemenag Jember khususnya Peyelenggara Syariah dan dibantu oleh BAZNAS dan LAS kabupaten Jember, SOP yang digunakan mengacu pada pedoman Kemenag Kabupaten Jember, sumber daya anggaran dan peralatan sudah cukup bersumber dari dana UPZ, BAZNAS, LAS dan anggaran Kemenag, penetapan manajemen pelaksana kebijakan terdapat satu koordinator di Kampung Zakat Terpadu, jadwal kegiatan direncana dari awal kegiatan oleh pelaksana kebijakan, proses validasi data dilaksanakan sesuai prosedur, *kedua* sosialisasi awal sudah dilaksanakan dengan baik, sumber daya terdiri dari sumber daya manusia sudah cukup (jumlah dan keahlian), sumberdaya anggaran sudah cukup bersumber dari dana UPZ, BAZNAS dan LAZ, sumber daya peralatan sudah cukup bersumber dari dana anggaran Kemenag, sumber daya informasi dan kewenangan sudah jelas, disposisi sikap dan perilaku pelaksana sudah baik, dan struktur birokrasi yang sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan

ABSTRACT

Moh. Rowibuddin, Ahmadiono, M.EI. 2019: The Implementation of Economic Development Program in overcoming poverty at Jambearum Sumber Jambe Jember

Up to now, the problem of poverty has been a big problem. One of the poverty alleviation programs is the Economic Development Program. The Economic Development Program is a program that provides assistance in the form of livestock assistance, food packages, and house renovations to poor families if they meet the requirements.

The focus problems examined in this thesis are: (1) How is the implementation of the Economic Development Program in poverty alleviation in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jambe Jember? (2) What are the factors that influence the implementation of the Economic Development Program in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jambe Jember?

The purposes of this study are: (1) to describe the implementation of economic development program in poverty alleviation in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jambe Jember. (2) To describe the factors that affect the implementation of the economic development program in poverty alleviation in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jambe Jember.

This research is a field research which takes an object in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jambe Jember. Data in this study were obtained by observation, interview and documentation while the analysis used in this study by using descriptive analysis and validity of data using source triangulation.

The results of the study showed that, first, socialization of economic development program in Kampung Zakat Terpadu Sumber Jember implemented well, which is the policy implementers were Kemenag Jember, especially Islamic Organizer and assisted by BAZNAS and LAS Jember, SOP used refers to Guidelines of Kemenag Jember, budget resources and equipment are quite sourced from fund of UPZ, BAZNAZ, LAS AND equipment of Kemenag. The determination of policy implementing management there is a coordinator in Zakat Terpadu Jember and the schedule of activities planned by policy implementers, data validation process implemented according to procedure. Second, the initial socialization has been well done, resources consist of human resources (amount and expertise), budget resources are enough to get out of funds UPZ, BAZNAS and LAZ. The equipment of resources is quite sourced from the ministry of budget division, information resources and authority was clear, the disposition of attitude and executive behavior was well, and the bureaucratic structure that has been running well.

Key word: implementation, poverty

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN ERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 13 |

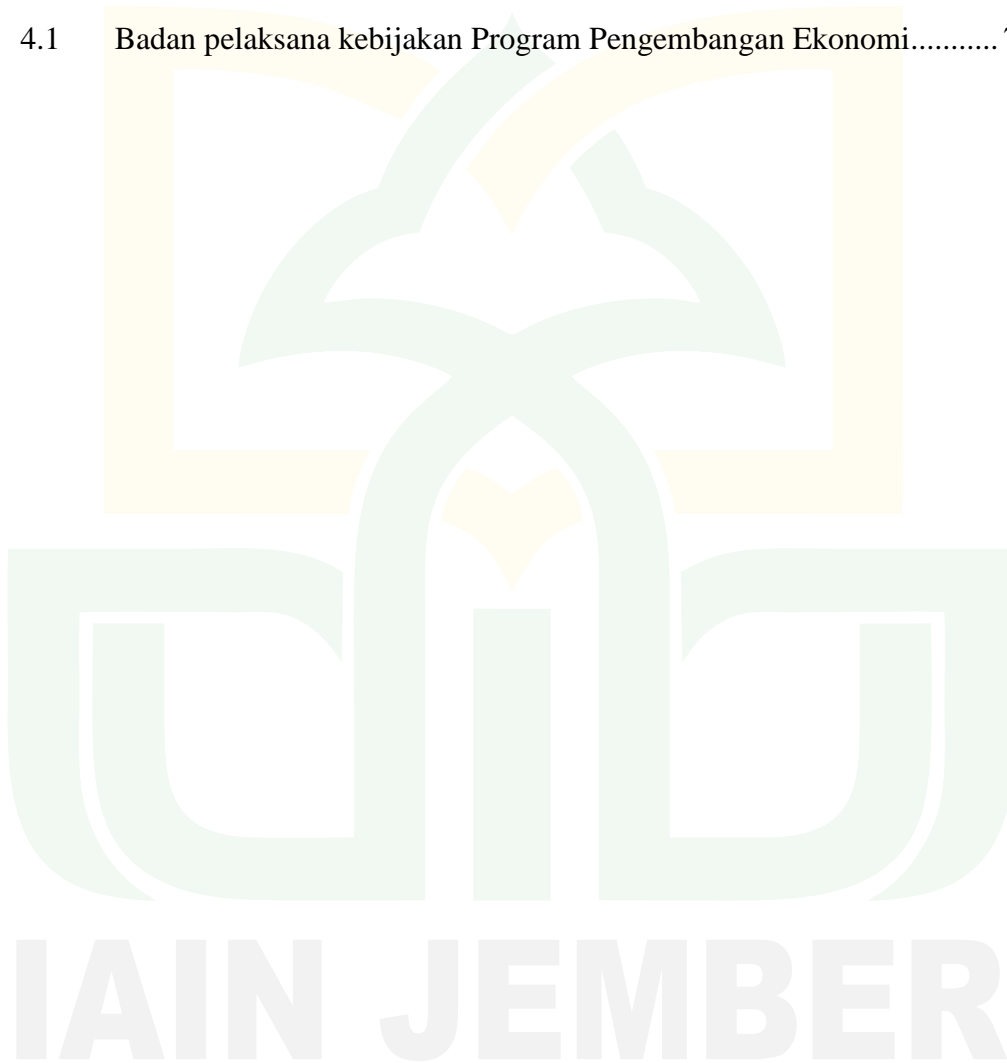
| | |
|--|-----------|
| B. Kajian Teori | 20 |
| 1. Implementasi Program | 20 |
| 2. Program Penanggulangan Kemiskinan | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 48 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian | 49 |
| C. Subyek Penelitian | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| E. Analisis Data | 54 |
| F. Keabsahan Data | 55 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 56 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI | 58 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 58 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 72 |
| 1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember | 72 |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember | 89 |

| | |
|--|------------|
| C. Pembahasan Temuan | 101 |
| 1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember | 101 |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember | 106 |
| BAB V PENUTUP..... | 111 |
| A. Kesimpulan | 111 |
| B. Saran..... | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| LAMIRAN-LAMPIRAN | |

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

| No | Tabel | Halaman |
|-----|---|---------|
| 2.1 | Tabulasi Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| 4.1 | Daftar Model Keluarga Sejahtera Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember..... | 68 |
| 4.1 | Badan pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi..... | 75 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Gambar | Halaman |
|-----|--|---------|
| 4.1 | Struktur Pengurus Kampung Zakat Terpadu..... | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Mantriks Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 4 : Surat Pemberian Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 5 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Pendirian Kampung Zakat Terpadu
- Lampiran 8 : SOP Pendirian Kampung Zakat
- Lampiran 9 : SOP Penyaluran Bantuan
- Lampiran 10 : Dokumentasi
- Lampiran 11 : Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena? ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuan, meskipun sejarah telah membuktikan hal ini adalah keniscayaan.¹

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang di inginkan oleh setiap manusia, baik kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencangkup horizon waktu dunia ataupun akhirat.²

¹ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2014), 13.

² Ibid, 54.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima *ke-maslahah-an*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *mashlahah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.³

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari tiga puluh empat provinsi serta jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih sekitar dua ratus enam puluh juta jiwa dengan profesi yang berbeda-beda. Profesi atau pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah petani, buruh, supir, dan sebagainya. Berdasarkan dari upah yang diperoleh setiap pekerja tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan primer bagi pekerja tersebut. Dapat dikatakan kebanyakan masyarakat Indonesia hidupnya belum sejahtera atau dengan kata lain adalah miskin.⁴

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya

³ Ibid, 54.

⁴ Muhammad Daud dan Yushita Marini, *Implementasi Progran Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin* (Jurnal:Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol. 2 No 1, 2018), 30.

kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapat atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal katagori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.⁵

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan “misteri” kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.⁶

Secara sederhana, penjelasan tentang sebab-sebab kemiskinan dapat dilihat kedalam dua golongan besar. *Pertama*, bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh perilaku dan sifat-sifat orang miskin sendiri; orang miskin

⁵ Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khander, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 1.

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 131.

karena malas, karena mereka memiliki "budaya kemiskinan" merupakan penjelasan baku. Ada dua tipe penjelasan. 1) Bahwa orang miskin menjadi miskin akibat kelemahan fisik dan genetik dan 2) Orang miskin menjadi miskin karena lingkungan sosialnya membawa kemiskinan atau "siklus kemiskinan" (*cycle of deprivation*), misalnya karena anak yang lahir dan besar dari lingkungan yang kumuh, miskin, dan kriminal. *Kedua*, lebih melihat di luar dirinya sebagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Sebab-sebab di luar itu bisa berupa kebijakan, struktur, dan juga sistem sosial ekonomi. Amartya Sen berpendapat bahwa kemiskinan merupakan gejala "hilangnya kebebasan" (*capability deprivation*) ketimbang "hilangnya Pendapatan". Karena, kemiskinan terkait dengan usia, kesehatan, lokasi sosial, jenis kelamin, dan wilayah tinggal seseorang; kemiskinan berkaitan dengan lemah-tidaknya daya seseorang untuk hidup bebas dan bermartabat sesuai dengan pilihan hidupnya.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, kemiskinan dapat di tanggulasi melalui beberapa cara, salah satunya dengan cara pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Swasono mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pem-bangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan

⁷ Hardojo, dkk, *Mendahulukan Si Miskin* (Yogyakarta: LKIS, 2008),15.

ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik.⁸

Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin. Program ini juga melibatkan masyarakat miskin dalam membangun kualitas hidupnya melalui pengembangan potensi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat sebagai pelaku dalam pembangunan.

Salah satu kendala dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya motivasi dari masyarakat miskin untuk mengambil peran dalam upaya pembangunan. Salah satu hambatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya dominasi kaum elite menentukan jalannya program. Akibatnya, hasil kegiatan justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu, ada fenomena bahwa proses pemberdayaan masyarakat terkadang menimbulkan ketergantungan masyarakat pada berbagai stimulan dari luar yang seringkali justru dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif.

Melihat kondisi tersebut, kemudian Kemenag Jember berinisiatif untuk membatu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Jember dengan Program Pengembangan Ekonomi. Setelah melakukan survei ke berbagai daerah miskin di Jember, pihak Kemenag menetapkan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa

⁸ Cornelis dan Miar Rintuh, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: BPF, 2005), 84.

Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Karena, Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum merupakan desa yang terletak di lereng Gunung Raung yang terdiri dari 237 KK dan 75% penduduknya sangat miskin. Mereka masih tinggal di rumah yang begitu sederhananya dengan berlantai tanah. Dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi ini Kemenag berharap dapat membantu mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi daerah di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kabupaten Jember.

Program Pengembangan Ekonomi ini merupakan bagian dari program Kampung Zakat Terpadu yang kemudian di resmikan pada hari rabu tanggal 15 Maret 2018 oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri. Program Pengembangan Ekonomi ini merupakan program pertama yang di cetuskan langsung oleh Kemenag Jember, yang nantinya Program Pengembangan Ekonomi ini akan di kembangkan di sepuluh kampung lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Kampung Zakat Terpadu, Ustad Amiruddin sebelum adanya Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum masyarakat di sana sangat jarang menerima bantuan yang berupa modal usaha. Selain itu, pernah ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang mengadakan kegiatan edukasi atau menyelenggarakan pasar murah tapi hasilnya kurang signifikan dan hanya bersifat sementara.⁹ Namun setelah adanya Program Pengembangan Ekonomi, meskipun

⁹ Ustad Amiruddin, *Wawancara*, Jember, 26 April 2019.

peresmiannya masih berusia kurang dari 2 tahun, dampak yang di rasakan masyarakat sangat besar, mengenai Program Pengembangan Ekonomi ini terdapat tiga buah bantuan, yaitu:

1. Bantuan paket sembako
2. Bantuan hewan ternak
3. Bantuan bedah rumah

Dengan demikian, Program Pengembangan Ekonomi ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum meskipun keberadaan program ini masih begitu dini.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang telah di paparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti ” Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹⁰ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang akan dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), 291.

¹¹ Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2015), 45.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkuat metode dibidang pekerjaan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman ke dalam bidang sesungguhnya serta sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.
- 2) Mampu memberikan pengembangan keilmuan yang telah didapat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, informasi maupun saran bagi pelaksana Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.

c. Bagi instansi

Dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta keputusan terutama yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Agar lebih memudahkan dalam memahami proposal ini, maka penelitian mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut ini:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan.¹³ Dalam kamus lmiyah populer juga di jelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implemen.¹⁴ Implementasi disini adalah pengaplikasian sebuah teori ke dalam realita atau lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan kesimpulan. Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam bukunya, implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dari proses perencanaan.¹⁵

Jadi, maksud implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan Program Pengembangan Ekonomi, yang dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

¹² Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan*, 45.

¹³ Sultan Rajasa, *Kamus Ilmiah Poluler* (Surabaya: Karya Utama: 2002), 234.

¹⁴ Ahmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolu: 2011), 162.

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2002), 70.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterbelakangan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi. Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Berisi tentang dekritif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup, Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁷

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, 15.

¹⁷ Ibid, 45.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan skripsi. Kajian kepustakaan terdiri dari penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis dengan Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang teori pengentasan kemiskinan. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran objek penelitian, dalam penelitian ini berisi gambaran umum tentang Program Pengembangan Ekonomi, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, dan juga pembahasan.

5. BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).¹⁸

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agus Zainal Abidin, Institut Agama Islam Negeri Jember (2018) Implementasi Manajemen Dalam Mengembangkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Persada Agung Cabang Jember. Dalam pola perencanaan yang dilakukan oleh persada Agung menggunakan prinsip objektivitas, procedural dan terprogram yang melahirkan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama), LPPA (Lembaga Pertanian Persada Agung) dan Toko buku Persada. Pelaksanaan pengembangan ekonomi yang telah dilakukan oleh Persada Agung menggunakan prinsip kekeluargaan, sementara program yang dijalankan yaitu: KUBE dan LPPA. Dengan pelaksanaan ini cukup mengantarkan anggotanya pada tingkat sejahtera II dan ada sebagian yang sudah mulai menginjak sejahtera III dan sejahtera III plus. Proses evaluasi yang sudah dilakukan oleh Persada Agung

¹⁸ Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan*, 52.

Cabang Jember yaitu dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan dilakukan dengan komunikasi non formal.

Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Disamping itu, keduanya meneliti tentang program pemerintah. Akan tetapi penulis lebih fokus pada implementasi programnya sementara penulis sebelumnya fokus pada pengembangan kesejahteraan ekonomi. Lokasi kedua penelitian juga berbeda; penelitian di atas terletak Persada Agung Cabang Jember sedangkan penelitian terletak di Kamung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan program yang diteliti juga berbeda.¹⁹

2. Ricky Fernando Alexander Sumolang, dkk, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung. Dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung ditinjau dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dinas sosial cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang kurang puas. Pengimplementasian kebijakan dalam konteks sumber daya yang ada di dinas sosial sudah cukup mumpuni dan jika dimaksimalkan tentunya pemerintah akan memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana tujuan dari program yang

¹⁹ Agus Zainal Abidin, "Implementasi Manajemen Dalam Mengembangkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Persada Agung Cabang Jember", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

ada. Disposisi, dalam hal ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan. Sedangkan untuk struktur birokrasi masih terkendala dalam aspek fregmentasi dalam regulasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada metode penelian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pembahasan dan lokasi penelitiannya, untuk penelitian di atas terletak di Kota Bitung, sedangkan peneliti saat ini terletak di Kabupaten Jember.²⁰

3. Yuyun Intan Safitri, Insitut Agama Islam Negeri Jember (2017) Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa, upaya PNPM pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur, penyediaan, pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Realisasi program PNPM dalam menanggulangi kemiskinan Masyarakat Desa Puger Kulon adalah dengan tiga Program, yaitu program plesterisasi, program jambanisasi dan program SPP (simpan Pinjam Perempuan). Proses evaluasi dan pengawasan PNPM

²⁰ Ricky Fernando Alexander Sumolang, dkk, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung", (Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2018).

dalam penanggulangan kemiskinan adalah melakukan survey ke berbagai penerima bantuan, melakukan musyawarah dan sosialisasi enam bulan sekali untuk plestarisasi dan jambanisasi. Evaluasi program SPP di lakukan dengan mendatangi kelompok-kelompok yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas usaha setiap satu bulan sekali untuk melakukan pemantauan dari usaha yang akan dijalankan.

Ada beberapa persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya tema pembahasan tentang pengentasan kemiskinan dan metode penelitiannya juga sama menggunakan kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada program yang diteliti dan lokasi penelitiannya, untuk penelitian di atas terletak di Desa Puger Kulon, sedangkan peneliti saat ini terletak di Dusun Paceh Desa Jambearum.²¹

4. Hijriatul Mabruk, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2016) Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) diKelurahan Karang Anyar Kecamatan Nenglasari Kota Tengerang. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 263 responden, dengan menggunakan rumus Slovin, dari pembahasan diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tengerang mencapai angka 75,31% dari yang diharapkan daro hipotesis sebelumnya peneliti berasumsi paling tinggi 70%. Hal ini

²¹ Yuyun Intan Safitri, “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

membuktikan bahwa kinerja para pembuat dan pelaksanaan kebijakan program beras rumah tangga miskin bekerja maksimal karena mengingat untuk mensejahterakan warga miskin sangat susah, yang mana memang mayoritas penduduk secara umum berada di bawah garis kemiskinan.

Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif. Disamping itu, keduanya meneliti tentang program pemerintah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, untuk penelitian di atas terletak di Kota Tengerang sedangkan penelitian terletak di Kabupaten Jember.²²

5. Wismoyo Ade Zaputra, Universitas Hasanuddin Makassar (2015)

Implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu tahap pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan, desa dan khusus perempuan. Tahap kedua, perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjangkaran spirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap ke empat yaitu proses pelaksanaan

²² Hijriatul Mabruk, "Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Nenglasari Kota Tengerang", (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016).

program PNPM Mandiri. Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam peningkatan produktifitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan rata-rata baik.

Ada beberapa persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya membahas program pemerintah dan metode penelitiannya juga sama menggunakan kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, untuk penelitian di atas terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sedangkan peneliti saat ini terletak di Dusun Paceh Desa Jambearum Kabupaten Jember.²³

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Agus Zainal Abidin. Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2018. | Implementasi Manajemen Dalam Mengembangkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Persada Agung Cabang Jember. | Menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas program pemerintah. | Lokasi penelitiannya, program yang diteliti dan lebih kepada pengembangan kesejahteraan ekonomi |
| 2. | Ricky Fernando Alexander Sumolang, | Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program | Menggunakan metode kualitatif. | Lokasi penelitiannya dan pembahasannya lebih kepada ke |

²³ Wis moyo Ade Zaputra, "Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan di kecamatan Lampung Kabupaten Pinrang", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015).

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2018 | Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung. | | kebijakannya |
| 3. | Yuyun Intan Safitri. Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2017. | Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Desa Puger KULon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. | Berbicara tentang kemiskinan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. | Lokasi penelitiannya dan program yang diteliti. |
| 4. | Hijriatul Mabruk, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016. | Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Nenglasari Kota Tangerang. | Membahas tentang program pemerintah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Lokasi penelitiannya dan program yang diteliti. |
| 5. | Wismoyo Ade Zaputra, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2015. | Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Lambang kabupaten Pinrang. | Membahas tentang program pemerintah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Lokasi penelitian, dan penelitian ini pembahasannya lebih kepada kebijakannya. |

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai persepektif, bukan untuk diuji.²⁴

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Definisi Implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Menurut kamus Webster mengemukakan bahwa implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap hal-hal tertentu.²⁵

Pasolong Mengutip dari Perkataan Hinggis, mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Selain itu, Usman juga mengatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau

²⁴ Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan*, 46.

²⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2018, 86.

adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi juga kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/ sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampaknya nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya

²⁶ Muhammad Daud dan Yushita Marini, *Implementasi Program Keluarga*, 31

untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan.²⁷

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

b. Proses implementasi

Menurut Jones dan Gaffar sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:²⁹

1) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

²⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*; 88.

²⁸ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gavo Media, 2012), 20.

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*; 89.

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktifitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kebijakan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat memenuhi dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan terjadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, tidak saja mereka jadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi lebih yang penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

2) Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasimana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sasaran (apa yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan kepemimpinan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan.

a) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementor*)

Pelaksana kebijakan (*Policy Implementor*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sektor swasta (*private sectors*)
- (3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- (4) Komponen masyarakat.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standart operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan

dilakukan, siap sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang di butuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sanga tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

d) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjukkan sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi

koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

e) Penetapan jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standard untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

3) Tahap Penerapan atau Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya.

c. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Dalam tahap kebijakan public terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan public Van Mater, Erward III, Grinde, dan Mazmanian dan Sebatier. Model Erword mengajukan empat faktor atau variable yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat

faktor tadi antara lain meliputi faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.³⁰

1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.

a) Sumber Daya Manusia

Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Dengan

³⁰ Ibid., 96.

demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sasaran yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan, informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan yang cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga sumber daya yang mempengaruhi kebijakan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3) Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku tersebut memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan, para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ada ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan

a. Program

Program seperangkat aktifitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu.³¹ Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.³²

b. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 120.

³² *Ibid.*, 79.

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.³³

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, dan penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.³⁴

c. Kemiskinan

1) Pengertian Kemiskinan

Dari masa ke masa, dalam setiap pemerintahan baik pemerintah feodal hingga pemerintah moderen saat ini, kemiskinan selalu ada. Sejak beberapa dekade yang lalu, Masyarakat dunia memahami bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi masalah negara tertentu, melainkan telah menjadi masalah global, yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut yang tepat.³⁵

Kemiskinan memang seumur dengan kehidupan manusia sendiri, tetapi kemiskinan bisa diperkecil dan dikurangi. Berbagai disiplin ilmu sosial telah memberikan sumbangan terhadap tujuan

³³ Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 19.

³⁴ Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 21.

³⁵ Aylee dan Sheyoputri, *Mengenal dan Memahami Kemiskinan* (Jakarta: CMB Press, 2016), 1.

itu. Ragam penjelasan tentang kemiskinan, telah dibahas dalam berbagai literatur ilmu-ilmu sosial.³⁶

Pengertian kemiskinan sangatlah beragam tergantung dari sudut pandang masing-masing ahli atau lembaga. Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kurang uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensional dengan banyak rupa serta tampilan.

Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern pada tahun 1776 mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk ketidak mampuan untuk membeli kebutuhan dasar (*nature*) dan kebutuhan khusus (*costum*). Dalam definisi ini, aspek status psikologis / soasial (*costum*) secara tersirat dianggap seimbang dengan kondisi yang murni bersifrat ekonomi (*nature*). Karenanya hal ini mencampur antara ukuran absolut (kebutuhan dasar) dengan aspek ukuran relatif (kebutuhan khusus).³⁷

Sementara John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi modal produktif atau asset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya), sumber-sumber keuangan, organisasi soasial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama,

³⁶ Hardojo, dkk, *Mendahulukan Si Miskin*, 14.

³⁷ Aylee dan Sheyoputri, *Mengenal dan Memahami Kemiskinan*, 7.

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan, dan informasi.³⁸

Seiring berjalannya waktu, muncul pula definisi-definisi mengenai kemiskinan yang lebih kompleks. Levitan mendefinisikan kemiskinan tidak hanya bentuk kekurangan barang-barang melainkan juga kekurangan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sejalan dengan Levitan, Schiller menyatakan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.³⁹

Di Indonesia, beberapa peneliti dan ahli dibidang ekonomi juga berusaha mengemukakan pendapatnya mengenai definisi kemiskinan. Diantaranya adalah Sayogya yang mengatakan kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras. Sedangkan menurut Suparlan kemiskinan didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Terhadap

³⁸ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: PT Gremedia, 2014), 30.

³⁹ Aylee dan Sheyoputri, *Mengenal dan Memahami Kemiskina*, 8.

tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.⁴⁰

Selain itu, United Nation for Development Program (UNDP) membagi kemiskinan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan absolute mengacu pada rendahnya tingkat pendapatan orang miskin. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, yang berkorelasi dengan distribusi pendapatan. Maksudnya, seseorang telah mampu memenuhi kebutuhandasarnya namun kadarnya masih terbilang rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya. Relativitas di sini merujuk pada lebarnya jurang ketimpangan antarkelas di masyarakat.⁴¹

Perundang-undangan Negara juga menjelaskan mengenai kemiskinan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penerangan Fakir miskin, pada Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang

⁴⁰ Ibid., 10

⁴¹ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, 31.

dimaksud adalah, kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.⁴²

Pada akhirnya, dari semua definisi yang telah dipaparkan diatas, definisi kemiskinan tampak sangat beragam dan kerennya dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kurang uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup sedangkan dalam arti yang lebih luas , kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensional dengan banyak rupa serta tampilan.

2) Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. SMERU, misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri :

- a) Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- c) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.

⁴² Aylee dan Sheyoputri, *Mengenal dan Memahami Kemiskina*, 14.

- e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberalam.
- f) Ketidakterlibatan dalamkegiatan sosial masyarakat.
- g) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesenimbangan.
- h) Ketidakmampuan untuk berusahakarenacacat fisik maupun mental.
- i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinaldan terpencil).⁴³

3) Dimensi Kemiskinan

Badrudin membagi kemiskinan menjadi empat dimensi

yaitu:

- a) Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan
- b) Kemiskinan Absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebituhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuuk dapat hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk

⁴³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 132.

uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskina. Penduduk yang berpendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin

- c) Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat
- d) kemiskinan Kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.⁴⁴

4) Indikator Kemiskinan

Menurut *World Bank Institute*, ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur, *Pertama* adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin mudah terlupakan. *Kedua*, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. *Ketiga* adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang di arahkan kepada orang miskin. Dan yang *keempat* adalah untuk mengevaluasi

⁴⁴ M. Irwan, *Indek Kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam EkonoI Islam*, (Mataram: Universitas Mataram, Ekonobis, Vol, 3, NO. 2, 2017), 55.

efektifitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.⁴⁵ Salah satu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur menghitung kemiskinan:

a) Pendekatan BKKBN

Salah satu penerapan konsep dan definisi penah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga.⁴⁶ BKKBN membagi kriteria kesejahteraan keluarga kedalam lima tahapan, yaitu:⁴⁷

(1) *Pra sejahtera (sangat miskin)* diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, kesehatan. Secara klasifikasi lebih lanjut ia mengindikasikan golongan ini kedalam 2 hal, yaitu :

⁴⁵ Aylee dan Sheyoputri, *Mengenal dan Memahami Kemiskina*, 27.

⁴⁶ Ahmad Avenzora dan Yoyo Karyono, *Analisis dan Perhitungan Tingkat kemiskinan 2008* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 15.

⁴⁷ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 188.

(a) Indikator ekonomi

1. Makna dua kali atau lebih sehari
2. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya, di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian)
3. Bagian terluas lantai rumah dari tanah.

(b) Indikator Non-Ekonomi

1. Melaksanakan ibadah.
2. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

(2) *Kesejahteraan tahap 1 (miskin)* diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosialnya psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Indikatornya adalah: keluarga yang karena alasan ekonomi dapat memenuhi salah satu lebih indikatornya meliputi:

(a) Indikator Ekonomi

1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.

3. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

(b) Indikator Non Ekonomi

1. Ibadah teratur
2. Sehat tiga bulan terakhir.
3. Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
4. Usia 6-15 tahun bersekolah.
5. Anak lebih dari 2 orang, ber KB.

(3) *Keluarga Sejahtera II*, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:⁴⁸

- (a) Memiliki tabungan keluarga
- (b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- (c) Mengikuti kegiatan masyarakat.
- (d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- (e) Meningkatkan pengetahuan agama
- (f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- (g) Menggunakan sarana transportasi.

(4) *Keluarga Sejahtera III*, sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- (a) Memiliki tabungan keluarga

⁴⁸ Ibid., 189

- (b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- (c) Mengikuti kegiatan masyarakat
- (d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- (e) Meningkatkan pengetahuan agama
- (f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- (g) Menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- (a) Aktif memberikan sumbangan materil secara teratur.
- (b) Aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.

(5) *Keluarga Sejahtera III Plus*, sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:⁴⁹

- (a) Aktif memberikan sumbangan materiil secara teratur
- (b) Aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.

b) Pendekatan BPS

Pada tahun 2000 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (Pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasikan rumah tangga/penduduk miskin. Informasi ini berguna untuk

⁴⁹ Ibid., 190

penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cukup wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.⁵⁰

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu pada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:⁵¹

(1) Luas lantai perkapita:

(a) ≤ 8 m (skor 1)

(b) > 8 m (skor 0)

(2) Jenis Lantai :

(a) Tanah (skor 1)

(b) Kukan tanah (skor 0)

(3) Air minum/Ketersediaan air bersih:

(a) Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)

(b) Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)

(4) Jenis jamban/WC :

(a) Tidak ada (skor 1)

⁵⁰ Ahmad Avenzora dan Yoyo Karyono, *Analisis dan Perhitungan Tingkat kemiskinan 2008*, 16.

⁵¹ Ibid., 17.

- (b) Bersama/sendiri (skor 0)
- (5) Kepemilikan asset :
 - (a) Tidak punya asset (skor 1)
 - (b) Punya asset (skor 0)
- (6) Pendapatan (total pendapatan perbulan):
 - (a) ≤ 350.000 (skor 1)
 - (b) > 350.000 (skor 0)
- (7) Pengeluaran (persentase pengeliiaran untuk makanan) :
 - (a) 80 persen + (skor 1)
 - (b) < 80 persen (skor 0)
- (8) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :
 - (a) Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - (b) Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan vareabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stipwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomna kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang di dasarkan atas modus total dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah

tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.⁵²

d. Program Penanggulangan Kemiskinan

Dari penjelasan diatas mengenai program, penanggulangan, dan kemiskinan dapat diambil kesimpulan bahwa program penanggulangan kemiskinan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan soial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu Program Pengembangan Ekonomi. Program Pengembangan Ekonomi adalah program bantuan untuk masyarakat miskin yang ada di Dusun pache Desa Jambearum.

1) Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ife sebagai mana yang dikutip oleh Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁵³ Sedangkan menurut Rappaport sebagai mana yang telah dikutip oleh Edi Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat,

⁵² Ibid., 18.

⁵³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 58.

organisasi, dan komunikasi, diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.⁵⁴

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵⁵

b) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun secara kondisi

⁵⁴ Ibid., 59.

⁵⁵ Ibid., 60.

eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Beberapa kelompok yang dapat di katagorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- (1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis
- (2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing
- (3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.⁵⁶

2) Bantuan Langsung Tunai (*Cash Transfer*)

Bantuan langsung tunai yaitu program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau lainnya baik bersyarat atau tidak bersyarat yang ditujukan untuk masyarakat miskin.⁵⁷ Pemerintah menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Pengembangan Ekonomi. Program Pengembangan Ekonomi adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Target utama dari program ini adalah keluarga yang benar-benar miskin, dan bantuan akan diberikan

⁵⁶ Ibid., 60.

⁵⁷ Lutfianto, *Bantuan Langsung Tunai*, <https://lutfianto22.wordpress.com/?bantuan-langsung-tunai/> diakses pada 24 November 2018

kepada keluarga sampai mereka tidak termasuk kedalam kriteria miskin.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁵⁸ Sebelum melakukan penelitian, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵⁹

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁶⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu penyajian data, menganalisis data menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana proses implementasi

⁵⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.

⁵⁹ Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 8.

Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan oleh pihak Kemenag Kabupaten Jember dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi Program Pengembangan Ekonomi oleh Kemenag Kabupaten Jember. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena berdasarkan penelitian ini, peneliti tertarik terhadap pengentasan kemiskinan oleh pihak kemenag Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan.⁶¹ Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember merupakan lokasi pertama terselenggaranya Program Pengembangan Ekonomi, dan disana tercatat ada 237 kepala keluarga dan yang termasuk golongan mampu sekitar 25 persen sisanya termasuk golongan tidak mampu dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani/buruh tani.

C. Subyek Penelitian

Teknik *Purposive* sudah dilakukan untuk menentukan subyek penelitian. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data

⁶¹ Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.⁶²

Yang menjadi subyek penelitian di Dusun Paceh Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sebuah Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

1. Muhammad Muslim, S.Ag., M.sy. Selaku Direktur Kampung Zakat Terpadu
2. Amiruddin, S.Pd. Selaku Direktur Eksekutif Kampung Zakat Terpadu
3. Fauziah Inwinarni Selaku Direktur Keuangan Kampung Zakat Terpadu
4. Ach. Fadloil Selaku KASI Pemerintahan Desa Jambearum
5. Penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi
 - a. Ibu Nima (Janda)
 - b. Ibu Misnati (Janda)
 - c. Ibu Nuris

Penentuan subyek penelitian/informan menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.⁶³ dalam hal penelitian ini, peneliti memilih sumber data yang dianggap paling tahu tentang obyek yang akan diteliti.

⁶² Ibid, 85.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian*), 219.

D. Teknik Sumber Data

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bial responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁴

Adapun jenis-jenis obserfasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah obserfasi, jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁵

Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh sebuah data tentang :

- a. Pelaksana Kebijakan Peogram Pengembangan Ekonomi dalam proses mengimplementasikan Program Pengentasan Kemiskinan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelaksana Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Dalam proses implementasi Program Pengentasan Kemiskinan.

⁶⁴ Ibid, 145.

⁶⁵ Ibid, 227.

2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa:

- a. Sejarah berdirinya Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
- b. Tujuan diadakannya Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum
- c. Upaya Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Realisasi yang dilakukan badan pelaksana Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.
- e. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Pengembangan Ekonomi

⁶⁶ Ibid, 231.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁷

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya Program Pengembangan Ekonomi di dusun paceh, desa jambeareum, kecamatan sumberjambe, jember.
- b. Struktur Pelaksana Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambeareum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten ember.
- c. Struktur Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten ember.
- d. Data-data Program Pengembangan Ekonomi seperti: data manajer, data kepengurusan, dan data keanggotaan.

⁶⁷ Ibid, 240.

- e. Dokumentasi lain yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber yang diakui validitasnya dan memperkuat analisa objek pembahasan.

E. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁶⁸ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Mereduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori

⁶⁸ Ibid, 244.

dan sejenisnya. Namun, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁶⁹

F. Keabsahan Data

Bagian ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

⁶⁹ Ibid, 253.

dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara.⁷⁰

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.⁷¹ Diantara rencana pelaksanaan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan.
 - a. Meyusun rencana penelitian
 - b. Memilih laporan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

⁷⁰ Ibid, 260.

⁷¹ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

2. Tahap Pelaksanaan di lapangan

- a. Memahami latar penelitian, dan mempersiapkan diri.
- b. Memasuki lapangan
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Pasca Penelitian

- a. Menganalisis data yang diperoleh
- b. Mengurus perizinan selesai penelitian.
- c. Menyajikan data dalam bentuk laporan merevisi laporan yang telah disempurnakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Program Pengembangan Ekonomi diKampung Zakat Terpadu Dusun

Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Latar Belakang Berdirinya Program Pengembangan Ekonomi diKampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT. Dari 31 kecamatan tersebut diantaranya adalah terdapat Kecamatan Sumberjambe. Posisinya berada dibagian utara agak ketimur dari Kota Jember. Kecamatan ini juga sudah berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan berada di bawah lereng gunung Raung.

Kecamatan Sumberjambe memiliki 9 desa dan 58 dusun dengan luas wilayah 138.24 km². diantaranya adalah Desa Jambearum yang merupakan centra penghasil durian dengan cita rasa yang sangat tinggi. Meski demikian, Desa Jambearum ini menyimpan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah karena desa tersebut tergolong desa yang memiliki masyarakat yang rata-rata miskin. Di Dusun Paceh misalnya yang kemudian dinobatkan menjadi Kampung Zakat Terpadu pada tanggal 15 Maret 2018, dari 237 KK yang ada di kawasan tersebut 75 persennya adalah warga miskin atau bahkan masuk katagori sangat miskin.

Penduduk dikawasan Kampung Zakat Terpadu tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200.000 perbulan. Profesi mereka rata-rata adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri walaupun mereka berada di kawasan perkebunan. Rumah penduduk di kawasan Kampung Zakat Terpadu ini kebanyakan masih berupa gedek atau anyaman bambu dan berlantaikan tanah. Jauh dari katagori rumah sehat.

Kehidupan masyarakatnya berkelompok dan cenderung masih jauh dari katagori sejahtera. Meski demikian penduduk kampung tersebut sangaat ramah karena mayoritas penduduknya adalah bersuku Madura. Bahasa sehari-hari yang dipakai juga bahasa Madura. Hingga saat ini jalan menuju Kampung Zakat Terpadu masih berupa jalan makadam dan sangat sempit.

Bertitik tolak dari kondisi sosial masyarakat yang sangat miskin tersebut, Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bergerak untuk mendirikan Kampung Zakat di kawasan tersebut. Setelah melakukan survie beberapa kali, akhirnya Kantor Kementerian Agama memutuskan untuk mendirikan Kampung Zakat Terpadu dengan mengandeng semua Lembaga amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember. Dan pada tanggal 15 Maret 2018 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Drs. H. Samsul Bahri, M.Pd.I meresmikan Kampung Zakat Terpadu di Dusun Paceh Desa Jambearum didampingi Kepala Kantor Kemenag Jember, Drs. HM. Facrur Rozi M.HI dan Camat Sumberjambe Heri Setyawan serta Kabid Penaiz Zawa Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Barnoto.

Kampung Zakat Terpadu di Dusun Paceh Desa Jambearum tersebut menurut Kakanwil Kemenag Jatim merupakan Kampung Zakat dengan Program Pengembangan Ekonomi pertama di Jawa Timur dan akan dijadikan percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur.⁷²

b. Dasar Hukum Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Dasar hukum pembentukan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu adalah :

⁷² Dokumentasi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat.

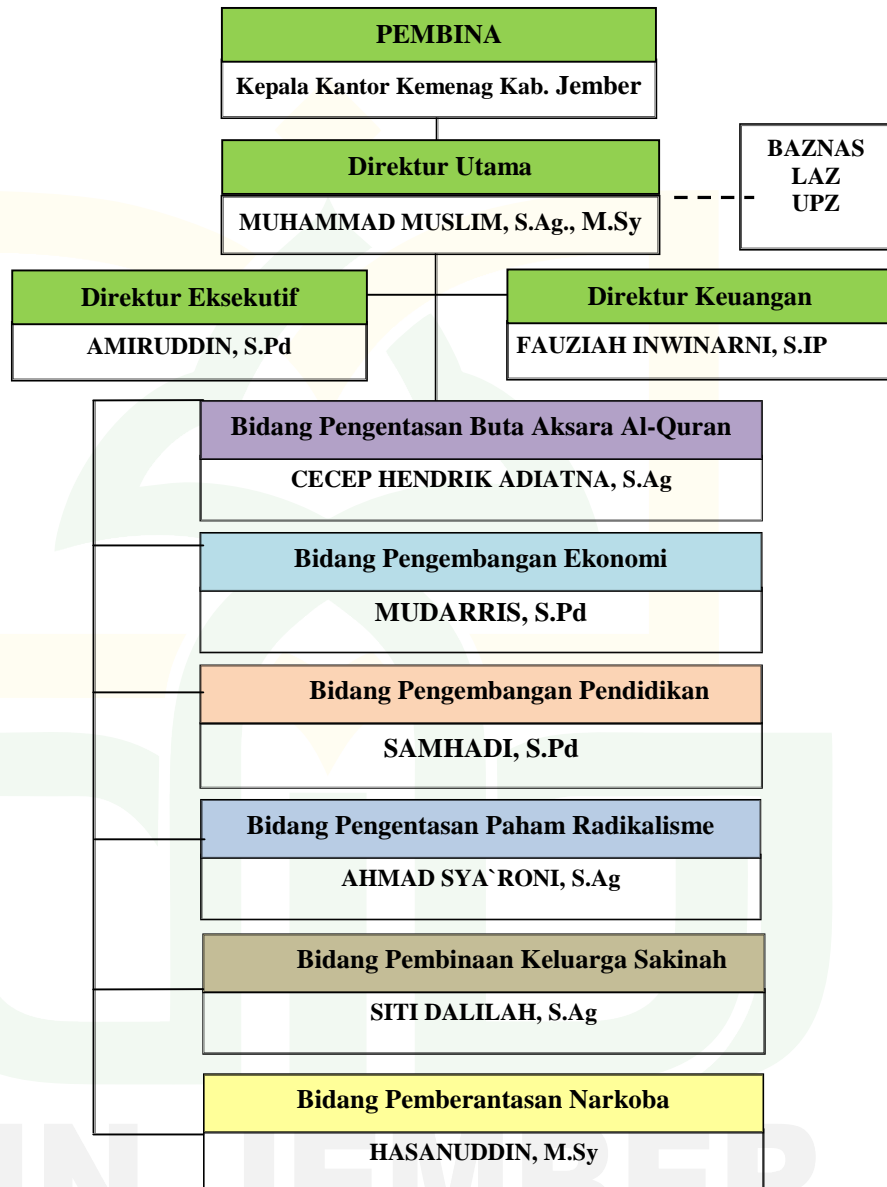
8) Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu.⁷³

c. Struktur Organisasi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Bedasarkan keputusan Kepala Kantor Kementian Agama Kabupaten Jember Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Tepadu maka dibentuk pula struktur pengurus Kampung Zakat Tepadu yang terdiri atas Pembina, Direktur Utama, Diektur Eksekutif, Direktur Keuangan dan bidang-bidang, yaitu: Bidang Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an, Bidang Pengembangan Ekonomi, Bidang Penembengan Pendidikan, Bidang Pembinaan Keluarga Sakinan, Bidang Pengentasan Paham Radikalisme dan Bidang Pengentasan Narkoba. Berikut ini adalah bentuk struktur pengurus Kampung Zakat Terpadu:

⁷³ Dokumentasi kampung zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Gambar 4.1
Struktur Pengurus Kampung Zakat Terpadu
Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember



Sumber: *Data diolah*⁷⁴

⁷⁴ Dokumentasi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

d. Tujuan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Secara umum tujuan pendirian Program Pengembangan Ekonomidi Kampung Zakat Terpadu, yaitu untuk:

- 1) Mengembangkan ekonomi dan sumber daya manusia menjadi lebih baik⁷⁵
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan kampung zakat terpadu
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
- 4) Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif
- 5) Merubah mustahiq menjadi muzakki
- 6) Menjadikan kampung bebas narkoba
- 7) Menjadikan kampung bebas gerakan radikal
- 8) Dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-qur'an.⁷⁶

e. Letak Geografis Program Pengembangan Ekonomidi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Program Pengembangan Ekonomidi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan luas 21.638 ha.dengan ketinggian

⁷⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/87296/kampung-zakat-terpadu-terobosan-kemenag-jember-lakukan-pemberdayaan>

⁷⁶ Dokumentasi kampung zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

antara 446 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 22-30⁰C. Bagian selatan Dusun Paceh berbatasan dengan Dusun Krajan, sebelah barat dengan Desa Pringkondani, bagian utara dengan Desa Sukowono-Kabupaten Bondowoso dan bagian timur dengan hutan lindung kaki gunung Raung-Kabupaten Banyuangi.

2. Dusun Paceh Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Profil Dusun Paceh Desa Jambearum

Dusun Paceh meruakan bagian dari Desa Jambearum yang terletak diujung utara Kabupaten Jember, sebelah selatan Desa Jambearumberbatasan dengan Dusun Krajan, sebelah barat dengan Desa Pringkondani, bagian utara dengan Desa Sukowono-Bondowoso dan bagian timur dengan hutan lindung kaki gunung Raung-Banyuangi, Dusun Pacehterdapat satu Rukun Warga (RW) dan enam Rukun Tetangga (RT) yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani.

Buah unggulan dari Dusun Paceh adalah buah durian yang sudah dikenal luas sebagai centra penghasil durian terbesar dengan cita rasa yang sangat tinggidi kabupaten Jember.

Berhubungan dengan centra pengghasil buah durian terbesar dengan cita rasa yang sangat tinggi, Dusun Paceh memiliki tradisi unik yang telah dilakukan secara turun temurun, yaitu tradisi Fastifal durian,

Fastifal durian diadakan tiap musim durian yang bertujuan untuk mensyukuri apa-apa telah Allah berikan kepada masyarakat Dusun Paceh Desa Jambearum Kabupaten Jember.

b. Visi dan Misi Dusun Paceh Desa Jambearum

1) Visi

”Terwujudnya pemerintah desa yang demokratis dan efisien dalam pemerintahan pembangunan dan pembangunan petani lokal desa.”

2) Misi

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan yang layak
- b) Pemberdayaan kelompok miskin dan ekonomi desa
- c) Mewujudkan sosial budaya yang berdayatahan
- d) Menjamin kepastian hukum
- e) Mewujudkan aparatu rdesa yang progresif.

c. Kependudukan Dusun Paceh

Jumlah penduduk yang berada di Dusun Paceh baik laki-laki maupun perempuan dengan rincian sebagai berikut: a) 729 jiwa, b) 237KK. Data tersebut ialah jumlah keseluruhan penduduk Dusun Paceh.

Jumlah penduduk yang berada di Dusun Paceh baik laki-laki maupun perempuan dengan rincian sebagai berikut:

1) Jenis kelamin

Laki-laki = 295 orang

Perempuan = 434 orang

2) Agama

Berdasarkan Agama yang dianut oleh penduduk Dusun Paceh semuanya menganut Agama Islam.

3) Profesi

Berdasarkan profesi yang dilakukan oleh warga Desa

Jambearum bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pedagang = 80 orang
- b) Petani/Peternak = 364 orang
- c) Buruh tani = 250 orang⁷⁷

d. Pemerintahan Dusun Paceh

Perangkat Desa :

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Kepala Desa | : SUTIKNO |
| Sekretaris | : M. SAHEBUDDIN |
| KASI Pemerintahan | : ACH. FADLOIL |
| KASI Kesejahteraan | : ABD. HAFIDH HASAN |
| KASI Pelayanan | : H. USTMAN FARUQ |
| Kepala Urusan Tata Usaha | : ABD. BASYIR |
| Kepala Urusan Keuangan | : ERUK CHOIRIYAH |
| Kepala Urusan Perencanaan | : SUMADI |
| KASUN Karang Sampurna | : MURAWI |
| KASUN Paceh | : MOH. SUCIPTO |
| KASUN Krajan | : SAMSAIFUL HALILINTAR |

⁷⁷ Ach. Fadloil, *wawancara*, Jember, 26 April 2019.

KASUN Sumber Kokap Barat : TOSIYADI

KASUN Sumber Kokap Timur : ABDUL KHALIQ

KASUN Sumber Petung : ABDUL HADI

KASUN Biarum : NEMAR⁷⁸

e. Kondisi Perekonomian Masyarakat Dusun Paceh

Kesejahteraan keluarga sangat bervariasi karena ukuran sejahtera tergantung pada dirinya sendiri. Dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut kondisi perekonomian yang ada di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Peneliti mengambil beberapa informan untuk mengetahui kesejahteraan dilihat dari segi tingkatan kesejahteraan. Berikut adalah daftar model keluarga sejahtera yang disajikan dalam tabel :

Tabel 4.1

Daftar Model Keluarga Sejahtera Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

| NO | Daftar Model Keluarga Sejahtera | |
|----|---------------------------------|-------|
| 1 | Prasejahtera (Sangat Miskin) | 64 KK |
| 2 | Kesejahteraan tahap I (Miskin) | 52 KK |
| 3 | Kesejahteraan tahap II | 45 KK |
| 4 | Kesejahteran Tahap III | 36 KK |

⁷⁸ Dokumentasi Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

| | | |
|-------|------------------------------|--------|
| 5 | Kesejahteraan Tahap III Plus | 17 KK |
| Total | | 237 KK |

Sumber data: Diolah dari dokumen Kampung Zakat Terpadu

1) Sebelum Berdirinya Program Pengembangan Ekonomi

Kondisi masyarakat di Dusun Paceh sebelum berdirinya Program Pengembangan Ekonomi, masih tidak memadai/sangat kekurangan bahkan masih belum dikatakan sejahtera karena masyarakat Dusun Paceh mendapatkan penghasilan dari buruh tani, bercocok tanam, dan berjualan, banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah akibatnya banyak masyarakat di Dusun Paceh yang tidak berpendidikan dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan yang layak. Sebelum adanya Program Pengembangan Ekonomi masyarakat Dusun Paceh untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya masih begitu sulit apa lagi sampek menyengolahkan anak-anaknya, sangat tidak mungkin.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Dusun Paceh tentang sebelum adanya Program Pengembangan Ekonomi:

- a) "... Dulu sebelum ada program ini, yang mau dimakan hari ini saja saya harus mencarinya hari ini juga, dan sangat tidak mungkin kalok saya harus menyengolahkan anak-anak saya".⁷⁹
- b) "... Dulu saya sebagai buruh tani saja, selesai bekerja saya langsung pulang, sesampainya di rumah saya bingung yang mau ngapain".⁸⁰

⁷⁹ Nima, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

⁸⁰ Misnati, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

- c) "... dari saking pelosoknya daerah yang saya tempati ini sampek jarang ada sentuhan dari pemerintah yang berwajib".⁸¹

2) Sesudah Berdirinya Program Pengembangan Ekonomi

Setelah adanya Program Pengembangan Ekonomi masyarakat desa Dusun paceh tidak lagi kebingungan untuk kebutuhan sehari-harinya, masyarakat tersebut memperoleh bantuan berupa dua ekor kambing untuk mereka besarkan dan nantinya mereka juga bisa mengambil keuntungan dari kambing tersebut dan mereka juga tidak kebingungan mengenai bahan-bahan pokok untuk di masak, karna setiap bulannya sudah ada bantuan berupa sembako dan bantuan bedah rumah dan juga mendapatkan penyuluhan dari setiap kegiatan yang diadakan oleh Program Pengembangan Ekonomi. Dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi membantu masyarakat untuk lebih kreatif mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Paceh tentang sesudah adanya Program Pengembangan Ekonomi:

- a) "Setelah adanya program ini, saya tidak lagi kebingungan mengenai apa yang akan saya makan hari ini dan saat ini sudah sangat memungkinkan untuk melanjutkan anak saya untuk menuntut ilmu".⁸²
- b) "Semenjak adanya Program Pengembangan Ekonomi, saya tidak lagi kebingungan mengenai apa yang akan saya kerjakan setelah bekerja ngeburuh, karna saya sudah punya tanggungan dua kambing untuk saya rawat dan saya besarkan".⁸³
- c) "Sekarang tidak lagi, dengan adanya program ini, sudah banyak pemerintah setempat yang menjumpai rumah-rumah

⁸¹ Nuris, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

⁸² Nima, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

⁸³ Misnati, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

kami, meskipun cuma tanya-tanya keberadaan setidaknya kan tidak seperti sebelum adanya program ini”.⁸⁴

Kondisi perekonomian masyarakat yang semula hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya. Dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi sangat terbantu perekonomian keluarganya, karena mereka mendapat bantuan dua ekor kambing untuk dipelihara dan pastinya akan mendapatkan hasil yang semula hanya ada 22 ekor kambing, sekarang sudah beranak pinak menjadi 32 ekor kambing, sedangkan setiap bulannya mendapatkan bantuan sembako untuk mereka konsumsi setiap harinya dan juga bantuan bedah rumah untuk masyarakat yang memang rumahnya layak untuk dibedah. Masyarakat sudah sedikit memiliki penghasilan atau upah, karena para keluarga tersebut memiliki harta yang tidak banyak seperti memiliki sawah hanya satu petak yang hasil panennya masih menunggu berbulan-bulan ataupun upah dari cucuran keringat mereka sebagai buruh tani sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari.

⁸⁴ Nuris, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Tahap Interpretasi.

Aktivitas interpretasi dimulai dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan kepada *stakeholders*. Sosialisasi merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan agar masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami adanya Program Pengembangan Ekonomi. Di Dusun Paceh Desa Jambearum kegiatan sosialisasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kementrian Agama Kabupaten Jember, Dengan mengumpulkan seluruh aparat desa dan masyarakat miskin yang ada di Dusun Paceh Desa Jambearum. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Muslim, selaku direktur utama kampung zakat terpadu:

“kalau sosialisasinya kami lakukan berbarengan dengan acara peresmian kampungzakat terpadu pada tahun 2018, yang kebetulan pada acara peresmian tersebut diresmikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri dan disaksikan oleh Camat Sumberjambe, Kepala Desa Jambearum, dan masyarakat sekitar kampung zakat terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum.”⁸⁵

Hal serupa di sampaikan oleh Amiruddin, selaku direktur eksekutif Kampung Zakat terpadu:

“Dulu, sosialisasi pertama dilaksanakan pas acara peresmian kampung zakat terpadu setahun yang lalu, yang disampaikan

⁸⁵ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

oleh Muhammad Muslim selaku Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama.”⁸⁶

Hal serupa lainnya juga disampaikan oleh Fauziah Inwinarni, selaku direktur keuangan kampung zakat terpadu:

“sosialisanya dilaksanakan pas awal-awal acara Kampung Zakat Terpadu, pas itu yang disampaikan mengenai pengertian, sasaran dan tujuan Program Pengembangan Ekonomi oleh Muhammad Muslim.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi Program Pengembangan Ekonomi pertama kali dilakukan pada acara peresmian kampung zakat terpadu pada tahun 2018, yang di hadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri dan disaksikan oleh Camat Sumberjambe, Kepala Desa Jambearum, dan masyarakat sekitar Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum. Sosialisasi disampaikan oleh Muhammad Muslim selaku direktur utama kampung zakat terpadu. Sosialisasi membahas seputar Program Pengembangan Ekonomi dan pelaksanaannya. Dalam sosialisasi tersebut antara lain disampaikan pengertian Program Pengembangan Ekonomi, sasaran Program Pengembangan Ekonomi, serta tujuan Program Pengembangan Ekonomi. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan Kepala Desa dan Lurah dapat mendukung adanya Program Pengembangan Ekonomidan selain itu masyarakat dapat mengetahui dan adanya Program Pengembangan Ekonomi.

⁸⁶ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

⁸⁷ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

Adapun Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum mempunyai tim penggerak tingkat kabupaten yang terdiri dari Kementrian Agama, BAZNAS dan LAZ (LAZ RIZKI, LAZISNU, LAZISMU, LAZ YATIM MANDIRI, LAZ NURUL HAYAT, LAZ AZKA, LAZ YDSF, DAN LAZ BMH, serta LAZ NURUL FALAH.) Kabupaten Jember, Camat, Kepala Desa. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Muslim:

“Untuk tim penggerak pada program ini Kemenag sendiri, dan juga dibantu BAZNAS dan LAZ yang ada di Kabupaten Jember.”⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Amiruddin:

“Tim penggerak pada program ini Kemenag khususnya penyelenggara syariah, BAZNAS dan LAZ yang ada di Kabupaten Jember dan juga Camat dan Aparat Desa Jambearum. Mereka juga sepakat untuk mensosialisasikan program ini melalui mulut kemulut.”⁸⁹

Hal serupa lainnya juga disampaikan oleh Fauziah Inwinarni:

“Setahu saya tim penggerak pada program ini kemenag sendiri, kabarnya juga dibantu oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember, tidak hanya sebatas tim penggerak mereka ikut bertanggung jawab pada program ini.”⁹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim penggerak pada Program Pengembangan Ekonomi yang terdiri dari Kemenag Jember, Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember, Badan Zakat Nasional Kabupaten Jember, Camat dan Kepala Desa Jambearum. Jadi dari awal mereka sudah punya kesepakatan akan

⁸⁸ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

⁸⁹ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

⁹⁰ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

mensosialisasikan Program Pengembangan Ekonomi ke jajaran di bawahnya melalui mulut kemulut. Sehingga sosialisasi tidak hanya dilakukan di dusun, tetapi juga di laksanakan di tingkat desa sehingga sosialisasi mengenai Program Pengembangan Ekonomi bisa merata di tingkat desa. Selain itu tim penggerak Program Pengembangan Ekonomi tersebut juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum.

b. Tahap Pengorganisasian

1) Pelaksana Kebijakan

Penyusunan keanggotaan pelaksana Program Pengembangan Ekonomi di Dusun paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember.

Berikut susunan keanggotaan TIM pelaksana Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum:

Tabel 4.2
Badan pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam TIM |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Muhammad | Kepala Kantor Kementrian Agama | Pembina |
| 2 | Muhammad Musim, S.Ag., M.Sy | Penyelenggara Syariah | Direktur Utama |
| 3 | Amiruddin, S.Pd | Tokoh Warga Dusun Paceh | Direktur Eksekutif |
| 4 | Fauziah Inwinarni, S,Ip | JFT Arsiparis | Direktur Keuangan |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|
| 5 | Mudarris, S.Pd.I | JFU Pengelola Data Penyelenggara Syariah | Bidang Pengembangan Ekonomi |
|---|------------------|--|-----------------------------|

Sumber: *Data diolah*

Direktur utama, direktur eksekutif, direktur keuangan, dan koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan dan mengusulkan anggaran melalui Pendapatan UPZ (Unit Pengumpu Zakat) Kantor Kementian Agama, BAZNAS dan LAZ guna mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi.
- b) Memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi antar pelaksana kebijakan
- c) Melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi.
- d) Menyelenggarakan pengadministrasian dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum.⁹¹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penyusunan badan pelaksana Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum adalah Kementian Agama Kabupaten Jember khususnya Penyelenggara Syariah yang dibantu oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember . Adapun kewajiban tim

⁹¹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

pelaksana kebijakan berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai yang telah dijelaskan diatas.

Adapun pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum terdiri dari pemberian hewan ternak berupa kambing, pemberian pakek sembako, bedah rumah, dan pendampingan kepada penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum koordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum. Adapun tugas dari seorang koordinator yaitu:

- a) Melakukan sosialisasi
- b) Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal
- c) Memfasilitasi dan melakukan penyelesaian masalah atas keluhan dan pengaduan peserta
- d) Melakukan pendampingan kepada penerima manfaat
- e) Melakukan koordinasi dengan pelaksana kebijakan dan penerima manfaat.⁹²

2) Prosedur Operasi Standar

Standard Operating Procedure (SOP) yang digunakan sebagai petunjuk, tuntunan, dan referensi Program Pengembangan

⁹² Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum mengacu pada SOP yang ada Kemenag.

Berikut SOP Kualifikasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi:

- a) Pernah mengikuti Diklat Zakat
- b) Memiliki kemampuan zakat, infaq dan shodaqoh
- c) Mengetahui tugas dan fungsi Penyelenggara Syariah
- d) Menguasai ilmu hitung dan alat hitung
- e) Mampu mengoprasikan komputer

Sedangkan SOP aktivitas penyaluran bantuan Program Pengembangan Ekonomi:

- a) Menerima surat permohonan/bantuan
- b) Mencatat dan mengarsipkan surat permohonan
- c) Menggendakan surve lapangan dalam rangka mengumpulkan data
- d) Mengumpulkan data terkait calon mustahiq berupa form, dan pengambilan gambar yang dipoerlukan
- e) Mempresentasikan data hasil surve
- f) Mengarsipkan data calon mustahiq
- g) Menyetujui pemohonan bantuan
- h) Belanja barang sesuai surat permohonan bantuan
- i) Menerima berita acara dan kuitansi dari toko terkait belanja sesuai permohonan bantuan.

3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Anggaran dan peralatan merupakan komponen yang penting dalam mendukung berjalannya pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum. Tanpa adanya anggaran dan peralatan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi akan terhambat. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum bersumber dari dana UPZ (Unit pengumpul Zakat) Kantor Kementerian Agama, BAZNAS dan LAZ yang ada di Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Muslim:

“Dana Program Pengembangan Ekonomi kami dapatkan dari dana UPZ yang merupakan unit pengumpul dana zakat dari pegawai-pegawai di bawah Kementerian Agama dan juga dari guru-guru agama dari guru MI yang pegawai negeri”⁹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Amiruddin:

“Dananya Insaallah cukup, kalau nggak cukup kita berusaha bagaimana cara untuk cukup, soalnya dana yang digunakan untuk program ini berasal dari UPZ, BAZNAS, dan LAZ. Sedangkan untuk sosialisasi, rapat dan lain-lain berasal dari anggaran Kemenag sendiri.”⁹⁴

Hal serupa lainnya juga diungkapkan oleh Fauziah

Inwinarni:

⁹³ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

⁹⁴ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

“Untuk dana Insaallah sudah cukup, dana kita bersumber dari UPZ, BAZNAZ, LAZ dan dana anggaran Kemenag itu sendiri. Sedangkan untuk peralatan sudah disediakan oleh pihak Kemenag”⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah cukup. Untuk sumber dana Program Pengembangan Ekonomi berasal dari pendapatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang di dapatkan dari zakat pegawai-pegawai di bawah Kementerian Agama dan juga dari guru-guru agama dari guru MI yang pegawai negeri, BAZNAZ dan LAZ. Sedangkan dana yang digunakan untuk keperluan sosialisasi, rapat dan sebagainya berasal dari anggaran Kemenag. Dengan demikian anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi.

Adapun peralatan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum sudah cukup karena sudah disediakan langsung oleh pihak Kemenag. Dengan demikian pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun

⁹⁵ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

Paceh Desa Jambearum bisa berlangsung dan berjalan dengan baik.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum terdapat satu pendamping yang telah di tetapkan sebagai kordinator di kampung zakat terpadu. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Untuk Koordinator saya menunjuk ustad Amiruddin, dikarenakan ustad Amiruddin orang pertama yang menyentuh masyarakat di Dusun Paceh Desa Jambearum.”⁹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin:

“Koordinator untuk program ini saya sendiri dek, mungkin dikarnakan saya yang paling dekat dengan masyarakat dan untuk pendampingan dan pengawasan juga lebih mudah dek, mungkin nanti kalok wes berkembang ke dusun yang lainnya, semoga saja berkembang pasti kordinantornya juga akan ditambahkan.”⁹⁷

Hal serupa lainnya juga diungkapkan oleh Fauziah

Inwinarni:

“Koordinator Program Pengembangan Ekonomi itu ustad Amiruddin, maski beliau juga selaku direktur eksekutif kampung zakat terpadu, terapi beliau siap untuk menjalankan tugas untuk mengkoordinir, mendampingi, dan memantau penerima manfaat dan juga mengevaluasi, memonitoring, dan membuat laporan hasil kegiatan.”⁹⁸

⁹⁶ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

⁹⁷ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

⁹⁸ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum dikoordinatori oleh ustad Amiruddin, dengan alasan beliau orang yang sering berpapasan langsung dengan penerima manfaat.

Sedangkan untuk tugas dari koordinator yaitu mengkoordinir para penerima manfaat jika ada permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat dan nanti koordinator juga akan mengevaluasi, memonitoring, membuat laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Ekonomi.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh pelaksana kebijakan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Untuk jadwal kegiatan ada, seperti halnya untuk bantuan paket sembako, kita laksanakan satu bulan satu kali, sedangkan untuk bantuan hewan ternak kami laksanakan di awal peresmian Kampung Zakat Terpadu dan untuk kebelakannya kami akan memantau perkembangannya gimana.”⁹⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin:

“Jadwal ada, memang kita udah tentukan dari awal. Tapi kami tidak selalu terpaku pada jadwal, terkadang kami

⁹⁹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

menyesuaikan sama keadaan, seperti halnya bedah rumah.”¹⁰⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fauziah Inwinarni:

“jadwal kegiatannya sudah ada, dek. Tapi ya begitu, kadang kita melaksanakan bantuan tidak sesuai dengan jadwal, terkadang dikarenakan ada kegiatan Kemenag sendiri yang tidak bisa ditinggalkan.”¹⁰¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jadwal pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum sudah direncanakan dari awal pelaksanaan kegiatan, seperti halnya bantuan paket sembako yang rutin dilakukan setiap bulan dan untuk bantuan hewan ternak hanya kami lakukan diawal kegiatan untuk kebelakannya pelaksana kegiatan hanya sekedar memantau perkembangannya, sedangkan untuk bedah rumah menyesuaikan dengan keadaan dana/anggaran.

c. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum. Adapun Kegiatan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum yaitu sebagai Berikut:

- 1) Validasi Calon Penerima Manfaat Program Pengembangan Ekonomi

¹⁰⁰ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹⁰¹ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

Validasi calon peserta Program Pengembangan Ekonomi merupakan pencocokan data dan penetapan penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi. Menurut Muhammad Muslim proses validasi penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi melalui beberapa tahap:¹⁰²

- a) Terdaftar sebagai warga Dusun Paceh Desa jambearum Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember
- b) Termasuk dalam kriteria kemiskinan di kabupaten Jember.
- c) Memiliki salah satu atau lebih dari komponen Program Pengembangan Ekonomi.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa proses validasi calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi melalui beberapa proses. Pertama pihak pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi akan mendapatkan data calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi dari Camat berupa by name by address. Langkah selanjutnya yaitu pelaksana kebijakan memastikan apakah orang yang terdaftar dalam data tersebut bebar-benar miskin atau tidak dengan cara mendatangi Kelurahan untuk memastikan apakah calon peserta benar-benar miskin atau tidak. Selain itu untuk memastikan calon Penerima Bantuan Program Pengembangan Ekonomi benar-benar miskin Pelaksana Kebijakan melakukan survei kealamat calon penerima

¹⁰² Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

manfaat dan menanyakan kondisi calon penerima manfaat ke masyarakat sekitar. Di Jember itu sendiri kriteria kemiskinan yang berasal dari rumah tangga yaitu:¹⁰³

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian/mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hak dasar
- b) Mempunyai pengeluaran sebagai besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali Puskesmas atau subsidi pemerintah
- d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk tiap anggota rumah tangga
- e) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama
- f) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- g) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau semen
- h) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik
- i) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
- j) Luas lantai rumah kurang dari 8 M

¹⁰³ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

k) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi.

Dari penjelasan diatas, pelaksana kebijakan bisa menyebutkan seseorang tidak masuk kedalam calon penerima Program Pengembangan Ekonomi apabila orang tersebut tidak memiliki komponen Program Pengembangan Ekonomi, alamat tidak ditemukan dan kaya. Setelah itu baru bisa ditetapkan siapa saja yang menjadi calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi.

2) Pertemuan Awal Calon Penerima Manfaat Program Pengembangan Ekonomi

Agar implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya pertemuan awal calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi. Untuk Dusun Paceh Desa Jambearum telah dilakukan sosialisasi atau pertemuah awal calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi yang di lakukan di sekretariat kampung zakat terpadu. Hal ini dilakukan agar calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi memahami tentang Program Pengembangan Ekonomi sehingga akan memperlancar berjalannya pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum. Berikut

hasil wawancara dengan penerima manfaat Program

Pengembangan Ekonomi:

“Dulu itu saya dapat undangan disuruh datang ke rumahnya ustad Amir (Sekretariat Kampung Zakat terpadu) untuk mengikuti acara sosialisasi, beberapa hari setelah acara tersebut saya dapat undangan ke rumahnya Ustad Amir untuk pencocokan data dan sedikit memperjelas tentang program ini, nak.”¹⁰⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh penerima manfaat

Program Pengembangan Ekonomi:

“kapan itu saya disuruh kumpul ke rumahnya ustad Amiruddin acara pencocokan data ke rumahnya ustad Amir. Untuk mengikuti acara sosiisai itu. Tapi sebelumnya saya sudah dapat undangan ke rumahnya ustad Amiruddin Untuk mengikuti acara sosiisai”¹⁰⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh penerima manfaat

Program Pengembangan Ekonomi:

“setelah acara peresmian itu saya dapat undangan untuk ke rumahnya ustad Amir, katanya itu untuk pencocokkan data dan sedikit penyampain tentang Program Pengembangan Ekonomi”¹⁰⁶

3) Penyaluran Bantuan Program Pengembangan Ekonomi

Penyaluran bantuan Program Pengembangan Ekonomi

untuk bantuan paket sembako disalurkan melalui sekretariat Kampung Zakat Terpadu. Adapun penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi untuk bantuan paket sembako terdapat

17 orang penerima manfaat setiap bulannya, nantinya akan

mendapatkan kupon yang disebarlang langsung oleh koordinator

¹⁰⁴ Nima, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

¹⁰⁵ Misnati, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

¹⁰⁶ Nurisi, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

Program Pengembangan Ekonomi yang nantinya kupon tersebut bisa di tukarkan dengan paket sembako, untuk isi dari paket sembako tersebut terdapat 5 Kg Sembako, 2 Liter Minyak Goreng, 2 Kg Telur dan biasanya di tambah dengan sarimi atau yang lainnya. Dan untuk bantuan yang berupa hewan ternak tempat penyalurannya di Sekretariat Kampung Zakat Terpadu yang penyalurannya hanya dilakukan pada awal kegiatan yaitu pada acara peresmian Kampung Zakat Terpadu, pada bantuan ternak kambing ini hanya terdapat 12 orang penerima manfaat, sedangkan untuk setiap penerima manfaat mendapatkan 2 ekor Kambing, mungkin kebelakangnya hanya menampah penerima manfaat 1-2 KK saja dan pemantauan langsung untuk tiap 3 bulan sekali, sedangkan untuk bedah rumah untuk saat ini masih menyesuaikan dengan dana anggran dan jikalau ada nanti pihak Kenenag sendiri yang akan menyampaikan pada penerima manfaat kalok rumah akan dibedah. Hal ini diungkapkan oleh Amiruddin:

“Untuk yang menerima manfaat paket sembako terdapat 17 orang dan untuk pengambilannya, penerima manfaat harus membawa kupon yang telas saya sebar. Sedangkan untuk bantuan hewan ternak hanya 12 orang yang menerima manfaat dan penyalurannya hanya di awal kegiatan sedangkan untuk pemantawannya dilakukan 3 bulan sekali. Terkadang untuk bedah rumah kami menyesuaikan sama keadaan.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

Hal serupa juga diungkapkan oleh penerima manfaat

Program Pengembangan Ekonomi:

“Untuk pakek sembako itu saya ngambilnya di rumahnya ustad Amir, ya harus membawa kupon yang diberi ustad Amir.”¹⁰⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh penerima manfaat

Program Pengembangan Ekonomi:

“dulu sebelum rumah saya di bedah, saya didatangi pihak Kemenag kalok rumah saya mau di bedah, nak.”¹⁰⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini kebijakan Program Pengembangan Ekonomi merupakan keputusan Kementerian Agama yang dilakukan oleh bagian Penyelenggara Syariah dan melibatkan BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember. Adapun yang menjadi pelaksana Program Pengembangan Ekonomi selama dilapangan adalah seluruh pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun

¹⁰⁸ Nima, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹⁰⁹ Misnati, Penerima Manfaat, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

Paceh Desa Jambearum yang merupakan orang-orang terpilih. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Seluruh pelaksana kebijakan merupakan orang-orang terpilih dan tentunya mereka berpendidikan dan berpengalaman di bidangnya, kalok masalah SDM nya jangan di khawatirkan lagi karna setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan SDM pasti mereka kami ikutkan”¹¹⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin:

“Biasanya kalok ada acara pelatihan yang berkaitan dengan Program Pengembangan Ekonomi, biasanya saya yang disuruh ikut sama pak Muslim.”¹¹¹

Hal serupa lainnya juga diungkapkan oleh Fauziah Inwinarni:

“Sebelum adanya program ini, kami sebagai pelaksanak kebijakan program ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai sumber daya manusia, dan kadang kemenag sendiri juga mengadakan pelatihan.”¹¹²

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa pelaksana kebijaaan Program Pengembangan Ekonomi sebelumnya sudah diberikan pendidikan dan latihan terlebih dahulu , baik pelatihan diluar atau yang diadakan oleh Kemenag sendiri. Dalam hal ini pelatihan dilakukan agar pelaksana Program Pengembangan Ekonomi paham akan isi, tujuan, arah, kelompok sasaran dari Program Pengembangan Ekonomi sehingga mereka dapat mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan, dengan demikian apa yang menjadi sasaran dan tujuan program dapat tercapai.

¹¹⁰ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹¹¹ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹¹² Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

Berikut komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi, komunikasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi terkait Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum agar penerima manfaat paham akan arah, tujuan, dan sasaran dari Program Pengembangan Ekonomi dan bisa berkomitmen, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan menyebarkan brosur mengenai gambaran umum Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“kalau sosialisasinya kami lakukan berbarengan dengan acara peresmian kampungzakat terpadu pada tahun 2018”.¹¹³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin:

“Oh iya, selain komunikasi secara langsung, kami juga lakukan komunikasi secara tidak langsung dengan menyebarkan brosur, dek,”¹¹⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fauziah Inwinarnai:

“Setahu saya, komunikasi yang dilakukan ya itu, sosialisasi yang pas acara peresmian itu, dek.”¹¹⁵

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum baik terhadap pelaksana

¹¹³ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹¹⁴ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹¹⁵ Fauziah Inwinarnai, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

ataupun penerima manfaat sudah dilakukan dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan tercapainya keberhasilan suatu implementasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka implementasi tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sumber daya yang terdapat dalam Program Pengembangan Ekonomi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini disamping harus cukup (jumlah) juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Untuk sumber daya manusia di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum bisa dikatakan cukup dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diungkapkan oleh Amiruddin:

“Untuk pelaksana kebijakan Insaallah sudah cukup karena program ini masih seputar di Dusun Paceh saja dan menguasai di bidangnya masing-masing, dek.”¹¹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Cukup, kalau jumlah pelaksana kebijakana kampung zakat terpadu, untuk di struktural terdapat 10 pelaksana, sedangkan untuk Program Pengembangan Ekonomi terdapat satu orang koordinator, juga dibantu oleh 3 orang

¹¹⁶ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

badan pengurus harian Kampung Zakat Terpadu dan juga dibantu BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember .”¹¹⁷

Hal serupa lainnya juga diungkapkan oleh Fauziah

Inwinarni:

“Untuk pelaksana kebijakan memang orang-orang pilihan dan bisa dibilang cukup, soalnya program ini masih kami jalankan di tingkat dusun.”¹¹⁸

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia pada Program Pengembangan Ekonomi sudah cukup dikarenakan pada program ini terdapat koordinator yang secara jelas mendampingi penerima manfaat, dan koordinator nantinya juga dibantu oleh pengurus badan harian dan juga dibantu oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember pada Program Pengembangan Ekonomi. Untuk keahliannya, pelaksana kebijakan khususnya koordinator memang orang-orang terpilih yang mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas yang diembannya, koordinator mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas dan perintah dari atasan.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum dari dana UPZ, BAZNAS, LAZ

¹¹⁷ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹¹⁸ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

dan anggaran Kemenag. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Muslim:

“Dana Program Pengembangan Ekonomi kami dapatkan dari dana UPZ yang merupakan unit pengumpul dana zakat dari pegawai-pegawai di bawah Kementerian Agama dan juga dari guru-guru agama dari guru MI yang pegawai negeri”¹¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Amiruddin:

“Dananya Insaallah cukup, kalau nggak cukup kita berusaha bagaimana cara untuk cukup, soalnya dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dana UPZ, anggaran Kemenag, BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember.”¹²⁰

Hal serupa lainnya juga diungkapkan oleh Fauziah

Inwinarni:

“Untuk dana Insaallah sudah cukup, dana kita bersumber dari UPZ dan dana anggaran Kemenag itu sendiri.”¹²¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dana yang digunakan untuk dana penyaluran bantuan pada penerimaan manfaat Program Pengembangan Ekonomi bersal dari dana UPZ, BAZNAS dan LAZ dan anggaran Kemenag, banyaknya dana yang gunakan untuk Program Pengembangan Ekonomi itu tergantung banyak tidaknya orang yang membayar zakat kepada UPZ itu sendiri. Sedangkan dana yang digunakan untuk keperluan sosialisasi, rapat dan sebagainya berasal dari dana anggaran Kemenag.

¹¹⁹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹²⁰ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹²¹ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

3) Sumber Daya Peralatan

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah memadai. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Kalau sarana yang digunakan untuk pelaksanaan program itu tempatnya di Sekretariat Kampu Zakat Terpadu, sedangkan untuk rapat internal pelaksana kebijakan itu sering dilaksanakan di Kemenag.”¹²²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin:

“Pelaksanaannya disini (sekretariat kampung zakat terpadu) dek, sedangkan untuk rapat kepengurusan tempatnya di Kemenag karna pengurusnya mayoritas dari Kemenag sendiri. Kalok sarananya sepertimeja, kursi, listrik, komputer, printer, dll.”¹²³

Hal serupa lainnya juga disampaikan oleh Fauziah

Inwinarni:

“Untuk peralatan memang disediakan oleh Kemenag, Insaallah di kemenag lengkap, dek.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah memadai. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum seperti sosialisai, pertemuan antara pelaksana kebijakan dengan penerima

¹²² Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹²³ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹²⁴ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

manfaat dilaksanakan di sekretariat kampung zakat terpadu, sedangkan untuk pertemuan para pelaksana kebijakan dilaksanakan di kantor Kementerian Agama.

Untuk prasarana yang digunakan juga sudah cukup memadai, alat-alat yang digunakan untuk kegiatan sudah tersedia di sekretariat kampung zakat terpadu seperti daftar hadir, buku catatan, dan laptop.

4) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Pacheh Desa Jambearum, koordinator selalu melakukan koordinasi dengan pelaksana kebijakan terutama pada pengurus badan harian kampung zakat terpadu. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Muslim:

“Sering saya dapat laporan dari ustad Amir mengenai Program Pengembangan Ekonomi, kadang ustad Amir juga mintak masukan mengenai tindakan yang harus beliau lakukan terhadap permasalahan yang terjadi pada penerima manfaat”¹²⁵

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Amiruddin:

“Saya selaku koordinator selalu berkoordinasi pada temen-teman pelaksana kebijakan, lebih-lebih kepada pengurus badan harian. Sama penerima manfaat program Pengembangan Ekonomi juga, nanti jika ada masalah kan biar bisa cepat diatasi, dek.”¹²⁶

Hal serupa lainnya di ungkapkan oleh Fauziah Inwinarni:

¹²⁵ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

¹²⁶ Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

“Untuk koordinasi sesama pelaksana kebijakan sering kami lakukak, tapi ya begitu terkadang masih ada aja masalah yang timbul, dek.”¹²⁷

Dalam koordinasi dengan pelaksana kebijakan yaitu mengenai seputar pelaksanaan kewajiban penerima manfaat dan permasalahan yang ada misalnya jika ada kambing dari penerima manfaat mati, koordinator akan menanyakan kepada penerima manfaat, apa sebab kambing ini mati agar koordinator dan pelaksana kebijakan segera mengatasi permasalahan yang ada.

Selanjutnya koordinator selalu berkoordinasi dengan para penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi, koordinator sesekali menanyakan perkembangan kambing mereka, kendala yang dihadapi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Program Pengembangan Ekonomi. Hal ini dilakukan agar penerima manfaat agar lebih semangat lagi merawat kambing yang diberikan oleh pelaksana kebijakan, yang terpenting mereka semangat untuk berubah ke yang lebih baik.

Sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih ada permasalahan mengenai penyaluran bantuan yang mengalami keterambatan dan jumlah bantuan yang tidak sesuai (biasanya ada sepuluh paket ternyata

¹²⁷ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

hanya sembilan paket), keterlambatan dan jumlah bantuan yang tidak sesuai bisa terjadi akibat sumber informasi yang kurang serta kewenangan yang dilakukan kurang maksimal.

c. Disposisi

Keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi dapat dipengaruhi sikap dan perilaku implementer. Tanpa adanya sikap dan perilaku yang baik dari pelaksana maka Program Pengembangan Ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian di Dusun Paceh Desa Jambearum menjelaskan bahwa para pelaku kebijakan bersungguh-sungguh dan mempunyai kemauan dan juga mempunyai tekad yang kuat dalam mewujudkan tujuan dari Program Pengembangan Ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi:

“Ustad Amir dalam mendampingi peserta sudah bagus dan akrab juga sama masyarakat, nak.”¹²⁸

Hal serupa juga di ungkapkan oleh penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi:

“Jika saya lihat, pelaksana program ini memang sungguh ingin membantu kami, orangnya semangat-semangat, dek.”¹²⁹

Hal serupa lainnya juga di ungkapkan oleh penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi:

“dalam memotivasi kami untuk selalu bekerja keras, ustad Amir tidak ada capeknya, dan jikalau dari kami punya masalah

¹²⁸ Nima, wawancara, Jember, 20 Oktober 2019

¹²⁹ Misnati, wawancara, 20 Oktober 2019

ustad Amir sering memberi masukan dan jika bisa membantu belu pasti membantu.”¹³⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sikap dan prilaku koordinator sudah baik dalam mendukung tercapainya suatu tujuan dari Program Pengembangan Ekonomi. Tujuan Program Pengembangan Ekonomi untuk pemberantas kemiskinan, dalam mengubah cara berfikir penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi dibutuhkan waktu yang tidak instan dan sabar, maka dari itu koordinator selalu memotivasi penerima manfaat untuk mengubah cara berfikir mereka menjadi lebih baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang penting dalam implemantasi sebuah kebijakan selain adanya struktur birokrasi yang jelas serta adanya *Standar Operasional Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan suatu program merupakan suatu hal terpenting. Dalam hal ini terkait dengan struktur birokrasi terdapat komunikasi yang baik terhadap pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi.

Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Muslim:

“Kami selalu mengumpulkan badan pelaksana minimal 1 bulan 1 kali untuk melakukan monitoring dan evaluasi selama dilapangan, terkadang tidak sampai 1 bulan tergantung agenda yang kita adakan.”¹³¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Amiruddin:

¹³⁰ Nurisi, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹³¹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

“Sering kami kumpul untuk membahas terkait perkembangan Program Pengembangan Ekonomi, apalagi pas mau ngadakan acara, dek. Untuk melaksanakan tugas pasti kami mengacu pada SOP yang ada.”¹³²

Hal serupa lainnya juga disampaikan oleh Fauziah Inwinarni:

“Untuk kumpul sesama pelaksana kebijakan bisa dibilang sering, soalnya kami pelaksana kebijakan memang orang kemenag sendiri, sedangkan untuk SOP nya itu memang dari Kemenag.”¹³³

Pernyataan diatas menjelaskan terkait struktur birokrasi bahwa terdapat komunikasi seperti pemaparan diatas dijelaskan bahwa di Dusun Paceh Desa Jambearum koordinator melakukan koordinasi struktur birokrasi untuk melakukan pencapaian dari Program Pengembangan Ekonomi dan koordinator selalu melaporkan minimal 1 bulan 1 kali terkadang tidak sampai satu bulan bagaimana pelaksanaan selama dilapangan dan juga terdapat evaluasi untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan selama di lapangam.

Para pelaksana Program Pengembangan Ekonomi selalu menjalankan tugasnya dengan mengacu pada SOP yang berasal dari Kemenag sehingga hal ini akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Program Pengembangan Ekonomi.

¹³² Amiruddin, *wawancara*, Jember, 20 Oktober 2019

¹³³ Fauziah Inwinarni, *wawancara*, Jember, 15 Oktober 2019

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Tahap Interpretasi

Interpretasi menurut Jones yang dikutip oleh Joko Widodo, merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktifitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kebijakan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat memenuhi dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan terjadi.¹³⁴

Pada Program Pengembangan Ekonomi pertama kali dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar penerima manfaat faham mengenai pengertian, tujuan dan sasarannya. Tidak hanya mensosialisasikan kepada penerima manfaat tetapi juga tim penggerak juga mensosialisasikan Program Pengembangan Ekonomi kepada bawahannya dengan penyampaian mulut kemulut.

¹³⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*; 90.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasimana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diprlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan penetapan prasarana dan sasaran (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan kepemimpinan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan.¹³⁵

Ada lima macam bentuk pengorganisasian menurut Jones yang dikutip oleh Joko Widodo. *Pertama*, Pelaksana Kebijakan (*policy implementor*). *Kedua*, Standar prosedur operasi (*standard operating procedure*). *Ketiga*, Sumber daya keuangan dan peralatan. *Keempat*, Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. *Kelima*, Penetapan Jadwal Kegiatan.¹³⁶ Dari kelima macam bentuk pengorganisasian tersebut, kelimanya terdapat di Program Pengembangan Ekonomi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum, yaitu *Pertama*, Pelaksana kebijakan Program adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya dibagian Penyelenggara Syariah yang dibantu oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember. Sedangkan jenis kebijakan yang di laksanakan berupa Program Pengembangan

¹³⁵ Ibid, 91.

¹³⁶ Ibid, 91

Ekonomi meliputi pemberian hewan ternak berupa kambing, pemberian pakek sembako, bedah rumah, dan pendampingan kepada penerima manfaat. *Kedua*, *Standart operating procedure* (SOP) yang digunakan bersumber dari Kemenag sendiri, meliputi kualifikasi Pelaksanaan dan dan aktifitas penyaluran bantuan Program Pengembangan Ekonomi. *Ketiga*, Sumber daya keuangan berasal dari dana pendapatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang didapatkan dari zakat pegawai-pegawai di bawah Kementrian Agama dan juga dari guru-guru agama dari guru MI yang pegawai negeri dan juga memperoleh dana dari BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember. Sedangkan, sumber daya peralatan disediakan langsung oleh pihak Kemenag yang tentunya dana yang digunakan dari anggaran Kemenag. *Keempat*, Manajemen pelaksana kebijakan di koordinatori oleh Amiruddin, beliau merupakan orang yang sering berpapasan langsung dengan penerima manfaat. Mengkoordinir para penerima manfaat jika ada permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat dan nanti koordinator juga akan mengevaluasi, memonitoring, membuat laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Ekonomi merupakan tugas dari seorang koordinator. *Kelima*, jadwal pelaksanaan sudah direncanakan dari awal pelaksanaan kegiatan, seperti halnya bantuan paket sembako yang rutin dilakukan setiap bulan, dan untuk bantuan hewan ternak hanya kami lakukan diawal kegiatan untuk

kebelakangnya mungkin hanya penambahan satu sampai dua penerima manfaat dan pelaksana kebijakan hanya sekedar memantau perkembangannya, sedangkan untuk bedah rumah menyesuaikan dengan keadaan dana/anggaran.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi menurut Jones yang dikutip oleh Joko Widodo, merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.¹³⁷ Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun kegiatan pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum yaitu sebagai berikut:

Pertama, Proses validasi calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi melalui beberapa tahapan sebagai berikut, 1) pihak pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi akan mendapatkan data calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi dari Camat berupa by name by address. 2) Langkah selanjutnya yaitu pelaksana kebijakan memastikan apakah orang yang terdaftar dalam data tersebut benar-benar miskin atau tidak dengan cara mendatangi Kelurahan untuk memastikan apakah calon peserta benar-benar miskin atau tidak. 3) untuk memastikan calon

¹³⁷ Ibid, 94.

Penerima Bantuan Program Pengembangan Ekonomi benar-benar miskin Pelaksana Kebijakan melakukan survei kealamat calon penerima manfaat dan menanyakan kondisi calon penerima manfaat ke masyarakat sekitar.

Kedua, Untuk Dusun Paceh Desa Jambearum telah dilakukan sosialisasi atau pertemual awal calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi yang di lakukan di sekretariat kampung zakat terpadu. Hal ini dilakukan agar calon penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi memahami tentang Program Pengembangan Ekonomi sehingga akan memperlancar berjalannya pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum.

Ketiga, Penyaluran bantuan Program Pengembangan Ekonomi untuk bantuan paket sembako disalurkan melalui sekretariat Kampung Zakat Terpadu. Adapun penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi untuk bantuan paket sembako setiap bulannya akan mendapatkan kupon yang disebarakan langsung oleh koordinator Program Pengembangan Ekonomi yang nantinya kupon tersebut bisa di tukarkan dengan paket sembako, untuk isi dari paket sembako tersebut terdapat 5 Kg Sembako, 2 Liter Minyak Goreng, 2 Kg Telur dan biasanya di tambah dengan sarimi atau yang lainnya. Dan untuk bantuan yang berupa hewan ternak tempat penyalurannya di Sekretariat Kampung Zakat Terpadu yang penyalurannya hanya

dilakukan pada awal kegiatan yaitu pada acara peresmian Kampung Zakat Terpadu, untuk setiap penerima manfaat mendapatkan 2 ekor Kambing, mungkin kebelakangnya hanya menampah penerima manfaat 1-2 KK saja dan pemantauan langsung untuk tiap 3 bulan sekali, sedangkan untuk bedah rumah menyesuaikan dengan dana anggaran dan jikalau ada nanti pihak Kekenag sendiri yang akan menyampaikan pada penerima manfaat kalau rumah akan dibedah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Ada empat faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut Edward III yang dikutip oleh Joko Widodo. Empat faktor tadi antara lain meliputi faktor komunikasi. Sumber daya. Disposisi. Struktur birokrasi.¹³⁸ Dari keempat macam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, keempatnya menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum, yaitu:

a. Faktor Komunikasi.

Menurut Joko Widodo sebagai mana merngutip perkataan Edward III, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan

¹³⁸ Ibid, 97.

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakn kepada pelaksana kebijakan.

Berikut komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi, yaitu terdapat komunikasi langsung yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi terkait Program Pengembangan Ekonomi agar penerima manfaat paham akan arah, tujuan, dan sasaran dari Program Pengembangan Ekonomi dan bisa berkomitmen, sedangkan komunikasi tidak langsung dengan menyebarkan brosur mengenai gambaran umum Program Pengembangan Ekonomi.

b. Sumber Daya

Menurut Joko Widodo sebagai mana merngutip perkataan Edward III, Sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka implementasi tersebut tidak bisa dilaksanakan. Ada empat sumber daya yang ada di Kampung Zakat Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa jambearum. *Pertama*, Sumber daya manusia. Kedua, sumber daya Anggaran. *Ketiga*, sumber daya peralatan. Ketiga, sumber daya informasi dan kewenangan.¹³⁹ Dari keempat macam sumber daya tersebut, keempatnya terdapat di Program Pengembangan Ekonomi Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum, yaitu, *Pertama* Sumber daya manusia yang ada pada

¹³⁹ Ibid, 98.

Program Pengembangan Ekonomi sudah cukup dikarnakan pada program ini terdapat koordinator yang secara jelas mendampingi penerima manfaat, dan koordinator nantinya juga dibantu oleh pengurus badan harian dan pengurus bidang lainnya pada program Kampung Zakat Terpadu. Untuk keahliannya, pelaksana kebijakan khususnya koordinator memang orang-orang terpilih yang mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas yang diembannya untuk keahliannya, koordinator mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas dan perintah dari atasan.

Kedua, sumber daya anggaran pada Program Pengembangan Ekonomi sudah cukup yang berasal dari dana UPZ, BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jembe, banyaknya dana yang gunakan tergantung banyak tidaknya orang yang membayar zakat kepada UPZ, BAZNAS dan LAS itu sendiri. Sedangkan dana yang digunakan untuk keperluan sosialisasi, rapat dan sebagainya berasal dari dana anggaran Kemenag.

Ketiga, sumber daya peralatan pada Program Pengembangan Ekonomi sudah memadai. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum seperti sosialisai, pertemuan antara pelaksana kebijakan dengan penerima manfaat dilaksanakan di sekretariat kampung zakat terpadu, sedangkan untuk pertemuan para pelaksana kebijakan dilaksanakan di kantor Kementrian Agama. Untuk prasarana yang digunakan untuk kegiatan sudah tersedia di sekretariat

kampung zakat terpadu seperti meja, kursi, listrik, komputer, printer, dll.

Keempat, Sumber daya informasi dan kewenangan pada Program Pengembangan Ekonomi sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih ada permasalahan mengenai penyaluran bantuan yang mengalami keterambatan dan jumlah bantuan yang tidak sesuai (biasanya ada sepuluh paket ternyata hanya sembilan paket), keterlambatan dan jumlah bantuan yang tidak sesuai bisa terjadi akibat sumber informasi yang kurang serta kewenangan yang dilakukan kurang maksimal.

c. Disposisi

Menurut Joko Widodo sebagai mana merngutip perkataan Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pada Program Pengembangan Ekonomi yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, pelaksana kebijakan dalam mengubah cara berfikir penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi dibutuhkan waktu yang tidak instan dan sabar, maka dari itu koordinator selalu memotivasi penerima manfaat untuk mengubah cara berfikir mereka menjadi lebih baik.

d. Struktur birokrasi

Menurut Joko Widodo sebagai mana merngutip perkataan Edward III, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ada ketidak efisienan struktur birokrasi. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencangkup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Pada Program Pengembangan Ekonomi koordinator selalu melaporkan minimal 1 bulan 1 kali terkadang tidak sampai satu bulan melaporkan bagaimana pelaksanaan selama dilapangan dan juga terdapat evaluasi untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan selama di lapangam.

Para pelaksana Program Pengembangan Ekonomi selalu menjalankan tugasnya dengan mengacu pada SOP yang berasal dari Kemenag sehingga hal ini akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Program Pengembangan Ekonomi.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember terdiri dari tiga tahap, yaitu, *Pertama*, tahap implementasi terdiri dari kegiatan sosialisasi. Sosialisasi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum sudah dilakukan dengan baik. Sosialisasi dilakukan terhadap Tim Penggerak dan penerima manfaat mengenai pengertian, tujuan dan sarannya. *Kedua*, tahap pengorganisasian meliputi: 1) Badan pelaksana Program Pengembangan Ekonomi adalah Kementrian Agama kabupaten Jember khususnya Penyelenggara Syariah yang dibantu oleh BAZNAS dan LAZ Kabupaten Jember 2) Standar Prosedur Operasi yang digunakan mengacu pada pedoman yang ada di Kemenag. 3) Sumber daya anggaran dan peralatan sudah cukup. Anggaran bersumber dari dana UPZ, BAZNAS, LAZ dan anggaran Kemenag. 4) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan terdapat satu koordinator di Kampung Zakat Terpadu Dusun paceh Desa Jambearum. 5) Penetapan jadwal kegiatan oleh pelaksana kebijakan sudah direncanakan dari awal pelaksanaan kegiatan. *Ketiga*, Tahap aplikasi. 1)

Validasi calon peserta sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. 2) Pertemuan awal/sosialisasi calon penerima manfaat sudah dilaksanakan dengan baik. 3) Penyaluran bantuan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum terdiri dari empat faktor, yaitu, *Pertama* komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan dari pelaksana kebijakan ke penerima manfaat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Untuk komunikasi langsung dilakukan dengan mensosialisasikan sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan penyebaran brosur. *Kedua* sumber daya meliputi: 1) Sumber daya manusia sudah cukup antara jumlah dan keahliannya. 2) Sumber daya anggaran sudah cukup yang bersumber dari UPZ, BAZNAZ dan LAZ Kabupaten Jember. 3) Sumber daya peralatan sudah cukup yang bersumber dari dana anggaran Kemenang. 4) Sumber daya informasi dan kewenangan sudah dilakukan dengan baik. *Ketiga* disposisi sikap dan perilaku pelaksana kebijakan sudah baik dengan melihat kesungguhan dan tekad dalam melaksanakan tugas. *Keempat* struktur birokrasi terkait hal ini hubungan antara pelaksana dilakukan dengan baik, koordinator selalu berkoordinasi dengan pelaksana kebijakan untuk evaluasi kerja, serta SOP yang digunakan jelas hingga akan mempermudah dalam melaksanakan program.

B. Saran

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat ditemukan antara lain :

1. Kendala-kendala atau masalah yang terjadi hendaknya menjadi perhatian serius dari semua pihak yang terkait, seperti halnya kecemburuan masarakat lain yang tidak menerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi, untuk itu diharapkan menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak yang terkait.
2. Partisipasi aktif dari penerima manfaat dalam mengikuti seluruh kegiatan yang menjadi lingkup Program Pengembangan Ekonomi akan membantu Pemerintah Kementrian Agama menyukseskan program ini. Program pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa bantuan partisipasi aktif warga, karena pengentasan kemiskinan mewajibkan warga bukan sebagai objek saja melainkan juga sebagai subjek (pelaku).
3. Badan pelaksana dapat menumbuhkan kesadaran penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan Program Pengembangan Ekonomi agar digunakan untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menanmbah pendapatan demi kesejahteraan mereka beserta keluarganya, bukan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak membuahkan hasil yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Agus Zainal. 2018. *Implementasi Manajemen Dalam Mengembangkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Persada Agung Cabang Jember*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Avenzora, Ahmad Avenzora dan Yoyo Karyono. 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat kemiskinan 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Aylee dan Sheyoputri. 2016. *Mengenal dan Memahami Kemiskinan*. Jakarta: CMB Press.
- Azwar, 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cornelis dan Miara Rintuh. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardjo, dkk. 2008. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta: LKIS.
- Haughton. Jonathan dan Shahidur R. Khander. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.nu.or.id/post/read/87296/kampung-zakat-terpadu-terobosan-kemenag-jember-lakukan-pemberdayaan>.
- Irwan, M. 2017. *Indek Kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam Ekono Islam*. Mataram: Universitas Mataram, Ekonobis.
- Lutfianto, *Bantuan Langsung Tunai*, <https://lutfianto22.wordpress.com/?bantuan-langsung-tunai/> diakses pada 24 November 2018.
- Mabruk, Hijriatul. 2016. *Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Nenglasari Kota Tengerang*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Maulana, Ahmad. 2011. *kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: Absolu.
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavo Media.
- Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo

- Rajasa, Sultan. 2002. *kamus ilmiah populer*. Surabaya: Karya Utama.
- Safitri, Yuyun Intan. 2017. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Skripsi. Insitut Agama Islam Negeri Jember.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumolang, Ricky Fernando Alexander. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung*. Skripsi. Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- Usman, Nurdin. 2002. *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- Wahid, Nusron. 2014. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: PT Gremedia.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Zaputra, Wismoyo Ade. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan di kecamatan Lampung Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- <http://www.nu.or.id/post/read/87296/kampung-zakat-terpadu-terobosan-kemenag-jember-lakukan-pemberdayaan>

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub variabel | Indikator | Sumber data | Metode penelitian | Fokus Penelitian |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Dalam Pengerantasan Kemiskinan (Studi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember) | <p>A. Program Pengembangan Ekonomi</p> <p>B. Kemiskinan</p> | <p>1. Implementasi kebijakan</p> <p>2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi</p> <p>1. Ruang Lingkup Kemiskinan</p> <p>2. Penanggulangan Kemiskinan</p> | <p>a. Interpretasi</p> <p>b. Pengorganisasian</p> <p>c. Aplikasi</p> <p>a. Komunikasi</p> <p>b. Sumber Daya</p> <p>c. Disposisi</p> <p>d. Struktur Birokrasi</p> <p>a. Pengertian Kemiskinan</p> <p>b. Dimensi Kemiskinan</p> <p>c. Ciri-ciri Kemiskinan</p> <p>d. Faktor-faktor Kemiskinan</p> <p>a. Pemberdayaan</p> <p>b. Bantuan Langsung Tunai</p> | <p>1. Informan :</p> <p>a. Kemenag Jember</p> <p>b. Perangkat desa</p> <p>c. Badan Pelaksana Program Pengembangan Ekonomi</p> <p>d. Masyarakat penerima manfaat</p> <p>2. Kepustakaan</p> | <p>1. Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif</p> <p>2. Lokasi Penelitian : Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.</p> <p>3. Subyek Penelitian : Teknik <i>purposive</i></p> <p>4. Teknik pengumpulan data :</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Teknik analisis data :</p> <p>a. Data Reduction</p> <p>b. Data Display</p> <p>c. Conclusion Drawing</p> <p>6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</p> | <p>1. Bagaimana implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam pengerantasan kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</p> |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
J E M B E R

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 321 /In.20/7.a/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
Kepala KEMENAG Jember
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Moh. Rowibuddin
NIM : E20152141
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
No Telpon : 082331712525
Dosen Pembimbing : Ahmadiono, M.EI
NIP : 197604012003121005
Judul Penelitian : Implementasi Program SAJADAH (Santunan Janda dan Duda Rajin Ibadah) dalam Pengentasan Kemiskinan di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 20 Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Rowibuddin
NIM : E20152141
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 November 2019
Saya yang menyatakan,



Moh. Rowibuddin
NIM. E20152141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.kemenagkabijember.com; E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B 826 / Kk.13.32.7/TL.01/07/2019
Tempiran : -
Perihal : Pemberian izin penelitian

2 Juli 2019

Th.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Jember

Menindak lanjuti surat saudara nomor : B.321/ln.20 17.a/PP.00.9/05/2019 perihal permohonan izin penelitian di Kampung Zakat Terpadu Kecamatan Sumberjambe untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Moh.Rowibuddin
NIM : E20152141
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini memberikan izin penelitian Program SAJADAH (santunan janda duda dan ibadah) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe.

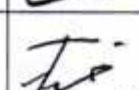
Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,
Penyelenggara Syariah

Muhammad Muslim

Busan : Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten Jember

JURNAL PENELITIAN

| No | Hari / Tanggal | Uraian Kegiatan | Paraf |
|----|-----------------------|---|---|
| 01 | Jum'at, 12 April 2019 | Penyerahan surat penelitian |  |
| 02 | Senin, 22 April 2019 | Wawancara bersama Direktur Utama Kampung Zakat Terpadu Bapak Muhammad Muslim |  |
| 03 | Jum'at, 26 April 2019 | Wawancara bersama Direktur Eksekutif Kampung Zakat Terpadu Ustad Amiruddin |  |
| 04 | Jum'at 26 April 2019 | Wawancara bersama KASI Pemerintahan Desa Jambearum Bapak Fadhoil |  |
| 05 | Jum'at, 26 April 2019 | Observasi |  |
| 06 | Selasa, 15 Okt 2019 | Wawancara bersama Direktur Utama Kampung Zakat Terpadu Bapak Muhammad Muslim |  |
| 07 | Selasa, 15 Okt 2019 | Wawancara bersama Direktur Keuangan Kampung Zakat Terpadu ibu Fauziah Inwinarni |  |
| 08 | Minggu, 20 Okt 2019 | Wawancara bersama Direktur Eksekutif Kampung Zakat Terpadu Ustad Amiruddin |  |
| 09 | Minggu, 20 Okt 2019 | Wawancara bersama penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi ibu Nima |  |
| 10 | Minggu, 20 Okt 2019 | Wawancara bersama penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi ibu Nuris |  |
| 11 | Minggu, 20 Okt 2019 | Wawancara bersama penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi ibu Misnati |  |
| 12 | Selasa, 05 Nov 2019 | Wawancara bersama Direktur Utama Kampung Zakat Terpadu Bapak Muhammad Muslim |  |
| 13 | Selasa, 05 Nov 2019 | Wawancara bersama Direktur Keuangan Kampung Zakat Terpadu ibu Fauziah Inwinarni |  |

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Badan Pelaksana Program Pengembangan Ekonomi

1. Latar belakang berdirinya Program Pengembangan Ekonomi?
2. Kapan dilaksanakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
3. Apa tujuan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
4. Siapa yang menjadi sasaran Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
5. Apasaja kriteria kemiskinan di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
6. Apakah telah dilaksanakan sosialisasi terkait Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
7. Siapa yang menjadi pelaksana Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
9. Apa tugas dari masing-masing pelaksana?
10. Bagaimana kemauan dan kesanggupan para pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
11. Bagaimana SOP yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
12. Bagaimana sumber dana dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum, sudah cukup/belum?
13. Apasaja sarana dan prasaranayang digunakan?
14. Bagaimana jadwal kegiatan kegiatan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?

15. Bantuan apa saja yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
16. Apa manfaat dari Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
17. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan?

B. Penerima Manfaat Program Pengembangan Ekonomi

1. Sejak kapan anda menerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi terkait Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
4. Apa saja kewajiban penerima manfaat?
5. Apakah penyaluran bantuan tepat waktu atau tidak?
6. Bagaimana prosedur pengambilan bantuan?
7. Bagaimana anda melihat kemauan dan kerelaan pelaksana kebijakan dalam mendampingi penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
8. Apakah pelaksana kebijakan selalu memberikan motivasi kepada pelaksana kebijakan?
9. Bagaimana jadwal pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum?
10. Berapa penghasilan keluarga?
11. Apakah penghasilan keluarga cukup untuk kebutuhan sehari-hari?

DOKUMENTASI



Plang selamat datang di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember



Luancing Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember



Bersama salah satu pelaksana kebijakan Program Pengembangan Ekonomi



Bersama salah satu penerima manfaat Program Pengembangan Ekonomi

Bantuan paket sembako



Bantuan hewan ternak



Bantuan bedah rumah



BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Rowibuddin
NIM : E20152141
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 24 Agustus 1997

Alamat : Dsn. Sumber Pinang RT 001 RW 001 Desa Bataal Barat
Kec, Ganding Kab. Sumenep

E-mail : jongrowib@gmail.com

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Nurul Islam Bataal Barat lulus pada tahun 2003.
- b. MI Nurul Islam Bataal Barat lulus pada tahun 2009.
- c. MTs Nurul Islam Bataal Barat lulus pada tahun 2012.
- d. MA 1 Annuqayah Guluk-guluk lulus pada tahun 2015.
- e. IAIN Jember lulus pada tahun 2020.